

TIMOR-LESTE EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (TL-EITI)

LAPORAN REKONSILIASI INDEPENDEN EITI UNTUK TAHUN 2013

Desember 2015



Laporan ini disusun atas permintaan *Multi-Stakeholder Working Group* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *Extractive Industries Transparency Initiative* di Timor-Leste (TL-EITI). Pendapat yang diungkapkan dalam laporan ini merupakan pendapat dari Rekonsiliator Independen dan sama sekali tidak mencerminkan pendapat resmi Sekretariat EITI Timor Leste. Laporan ini telah dipersiapkan secara eksklusif untuk digunakan oleh TL-EITI dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan.

Dokumen ini merupakan terjemahan dari dokumen asli dalam Bahasa Inggris, dan digunakan sebagai referensi saja. Bila terdapat perbedaan antara dokumen yang diterjemahkan dan dokumen asli dalam Bahasa Inggris, dokumen yang asli akan berlaku

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	7
KATA SAMBUTAN DARI <i>MULTI STAKEHOLDER GROUP</i> TIMOR-LESTE	8
1. PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Tujuan dari Penugasan	9
1.3. Sifat dan lingkup pekerjaan	10
2. RINGKASAN UNTUK EKSEKUTIF	11
2.1. Keterbatasan dalam pelaksanaan rekonsiliasi	11
2.2. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif	11
2.3. Data Produksi Minyak dan Gas	12
2.4. Kelengkapan dan akurasi data	12
2.5. Rekonsiliasi Pembayaran	13
3. PENDEKATAN DAN METODOLOGI	15
3.1. Rapat pembukaan	15
3.2. Tahap Awal	15
3.3. Proses Rekonsiliasi	16
3.4. Reliabilitas dan Kredibilitas data EITI	17
3.5. Dasar Pelaporan	17
4. GAMBARAN SEKTOR EKSTRAKTIF DI RDTL	18
4.1. Sektor Migas	18
4.2. Sektor Pertambangan	28
5. RUANG LINGKUP REKONSILIASI	30
5.1. Pemilihan Ruang Lingkup Rekonsiliasi	30
5.2. Perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam rekonsiliasi EITI	30
5.3. Pajak dan pendapatan yang tercakup	31
5.4. Lembaga Pemerintah	32
5.5. Bagan arus pembayaran dari sektor ekstraktif	32
6. HASIL REKONSILIASI	33
6.1. Rekonsiliasi berdasarkan perusahaan ekstraktif	33
6.2. Rekonsiliasi berdasarkan arus pendapatan	34
6.3. Penyesuaian	35
6.4. Perbedaan yang tidak dapat dicocokkan	37
7. DATA YANG DILAPORKAN	38
7.1. Analisa Pendapatan Pemerintah	38
7.2. Tanggung jawab sosial perusahaan	39

8. SARAN	40
8.1. Pelajaran dari rekonsiliasi tahun 2012 / 2013	40
8.2. Tindak lanjut atas rekomendasi dari Laporan EITI sebelumnya.....	41
LAMPIRAN.....	42
Lampiran 1: Rincian perusahaan Migas utama serta pendapatannya	43
Lampiran 2: Perkembangan pendapatan Migas tahun 2009-2013	44
Lampiran 3: Lokasi kontrak di Kawasan TLEA dan JPDA.....	45
Lampiran 4: Daerah Resapan MIGAS di RDTL.....	46
Lampiran 5: Profile perusahaan-perusahaan ekstraktif.....	47
Lampiran 6: Sumber-sumber mineral di RDTL.....	49
Lampiran 7: Pihak-pihak yang dihubungi atau terlibat dalam pelaksanaan rekonsiliasi EITI RDTL tahun 2013	50

DAFTAR SINGKATAN

APT	Additional Profit Tax/Pajak atas Keuntungan Tambahan
BOE	Barrel of Oil Equivalent/Barel setara minyak
CBTL	Central Bank of Timor-Leste/Bank Sentral Timor-Leste
CMATS	Certain Maritime Arrangement In The Timor Sea
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative/Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif
ESI	Estimated Sustainable Income/Perkiraan Pendapatan Berkelanjutan
ETRS	East Timor Revenue Services/Dinas Pendapatan Timor-Leste
FTP	First Tranche Petroleum
GDP	Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto
GDS	General Directorate of Statistics/Direktorat Jenderal Statistik
Govt	Government/Pemerintah
IPMC	Interim Petroleum Mining Code/Pedoman Pertambangan Minyak Interim
IUA	International Unitisation Agreement
JC	Joint Commission/Panitia Bersama
JPDA	Joint Petroleum Development Area/Kawasan Pengembangan Minyak Bersama
LNG	Liquefied Natural Gas/Gas Alam Cair
MoF	Ministry of Finance/Kementerian Keuangan
MOU	Memorandum of Understanding/Nota Kesepakatan
MPMR	Ministry of Petroleum and Mineral ReSumbers/Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral
MSG	Multi-Stakeholder Working Group/Kelompok Kerja Berbagai Pihak yang Berkepentingan
NDPMR	National Directorate Petroleum and Minerals Revenue/Direktorat Nasional Pendapatan Minyak dan Mineral
NPA	National Petroleum Authority/Badan Perminyakan Nasional
O&G	Oil & Gas/Minyak dan Gas (Migas)
PF	Petroleum Fund/Dana Perminyakan
PMC	Petroleum Mining Code/Pedoman Pertambangan Minyak
PSC	Production Sharing Contract/Kontrak Bagi Hasil Produksi
RDTL	Democratic Republic of Timor-Leste/Republik Demokrasi Timor-Leste
SERN	Secretary of State for Natural Resources/Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Alam
SOE	State-Owned Enterprise/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
SPT	Supplemental Petroleum Tax/Pajak Minyak Tambahan
TDA	Taxes and Duties Act/Undang-undang Pajak dan Bea Masuk
TLEA	Timor-Leste Exclusive Area/Lokasi Eksklusif Timor-Leste
TOR	Terms of Reference/Kerangka Acuan
TSDA	Timor Sea Designated Authority
TST	Timor Sea Treaty/Perjanjian Laut Timor
UNTAET	United Nation Transition Administration in East Timor/Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur
VAT	Value Added Tax/Pajak Pertambahan Nilai

DAFTAR SINGKATAN

WHT	Withholding Tax/Pemotongan Pajak atau Pajak Dibayar Dimuka
ZOCA	Zone Cooperation Area/Lokasi Kawasan Kerjasama

Kata Sambutan

Kata sambutan dari Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral

Laporan EITI Timor-Leste 2013 adalah laporan kedua negara kita setelah diterbitkannya Standar EITI 2013 yang baru. Laporan EITI 2013 dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mematuhi Aturan EITI 2013 dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi di Timor-Leste. Hal ini dapat terlihat dengan adanya informasi lebih detail mengenai BUMN, kandungan lokal dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta Informasi Kontekstual.

Sebagai contoh, pembaca akan menemukan bahwa hasil investasi Dana Minyak Timor-Leste untuk tahun 2013 mencapai \$ 865 juta, jumlah ini melebihi jumlah yang disetorkan ke anggaran Negara selama tahun 2013 sejumlah \$ 730 juta.

Total produksi minyak bumi Timor-Leste sejumlah 65.200.780 BOE pada 2013, turun 12,4% dari tahun sebelumnya.

Tantangan dari standar EITI yang baru mulai timbul ke permukaan dan hal ini menguji kemampuan MSG TL untuk memenuhi standar baru tersebut dan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang timbul tepat pada waktunya.

Selama tahun 2013, MSG TL terus menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui berbagai lokakarya.

Selamat kepada MSG TL untuk Laporan EITI 2013.



Alfredo Pires

Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral

Kata sambutan dari *Multi Stakeholder Group Timor-Leste*

Merupakan suatu kebahagiaan bagi MSG untuk mengumumkan bahwa Laporan EITI Timor-Leste yang keenam yang meliputi periode satu tahun yang berakhir 31 Desember 2013 telah disetujui untuk diterbitkan. Ini adalah laporan yang kedua yang diterbitkan pada tahun ini, menyusul penerbitan laporan EITI Timor-Leste yang kelima untuk periode satu tahun yang berakhir 31 Desember 2012.

Bukanlah hal yang mudah untuk sepenuhnya menerapkan standar EITI yang baru kedalam kedua laporan ini. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara memenuhi persyaratan EITI, terutama pada pengungkapan informasi, dan keadaan unik yang dihadapi oleh sektor industri ekstraktif di Timor-Leste.

Terlepas dari kedua laporan ini, Timor-Leste adalah salah satu dari lima Negara yang terpilih sebagai proyek percontohan pra-validasi oleh Sekretariat Internasional EITI pada bulan Nopember 2015. Hasilnya tidaklah menyenangkan karena dalam waktu yang sangat terbatas MSG harus mempertimbangkan temuan-temuan pada laporan tahun 2013, dan sekarang ini MSG memutuskan harus menerbitkan laporan tahun 2013.

Pada rapat tanggal 15 dan 22 Desember 2013, MSG memutuskan untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 2016 melalui publikasi laporan tambahan untuk mengatasi temuan pra-validasi dan rekomendasi di kuartal 1 tahun 2016, termasuk dari laporan tahun 2012 dan 2013; juga kebutuhan untuk mengembangkan rencana kerja yang lebih baik dengan kerangka waktu yang jelas untuk menghindari penundaan dan pedoman yang lebih baik untuk diskusi MSG mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan standar EITI di Timor-Leste.

Industri

Pemerintah

Masyarakat Sipil

Timor GAP

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rekonsiliasi Extractive Industries Transparency Initiative Republik Demokrasi Timor-Leste periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dilakukan oleh Moore Stephens sesuai dengan Kontrak Kerja tanggal 18 September 2014 yang telah disetujui oleh Multi-Stakeholder Working Group (MSG).

Ini adalah Laporan Rekonsiliasi yang kelima sejak RDTL menjadi negara taat azas EITI pada tanggal 1 Juli 2010. Hingga saat ini lima (5) Laporan Tahunan EITI telah diterbitkan untuk periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2012. Ringkasan laporan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun	Tanggal dipublikasikan	Sektor yang diliput	Penerimaan Negara (Juta USD)	Pembayaran Perusahaan (Juta USD)	Jumlah Perusahaan yang dilaporkan	Pelaksana Rekonsiliasi
2008	Oktober 2009	Migas	2.510	2.510	16	Deloitte
2009	Februari 2011	Migas	1.764	1.764	17	Deloitte
2010	Nopember 2012	Migas	2.150	2.150	20	Moore Stephens LLP
2011	Desember 2012	Migas	3.453	3.453	20	Moore Stephens LLP
2012	Februari 2015	Migas/Pertambangan	3.800	3.800	20	Moore Stephens LLP

Batas Waktu

MSG harus melakukan proses validasi paling lambat bulan Oktober 2015. Tabel berikut menyajikan batas waktu dari EITI untuk RDTL:

Tahun	Keterangan
2003	Pemerintah RDTL mengumumkan kepatuhannya pada EITI
2004	Produksi dimulai pada sumur minyak Bayu Undan
2005	Dana Perminyakan RDTL dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 9-2005
2006	Pemerintah mengundang untuk pembentukan Kelompok Kerja EITI
2007	Pertemuan pertama Kelompok Kerja EITI
2008	ANP didirikan berdasarkan Undang-undang no. 2-2008
2008	Sekretariat EITI dibentuk
2008	RDTL menjadi <i>Candidate Country</i>
2009	Laporan EITI tahun 2008 diterbitkan
2009	Pedoman EITI diselesaikan oleh Kelompok Kerja EITI
2010	RDTL ditunjuk menjadi <i>Compliant Country</i>
2011	Laporan EITI tahun 2009 diterbitkan
2012	Laporan EITI tahun 2010 diterbitkan
2012	Laporan EITI tahun 2011 diterbitkan
2015	Laporan EITI tahun 2012 diterbitkan
Oct. 2015	Batas waktu untuk validasi berikutnya

1.2. Tujuan dari Penugasan

Penugasan ini meliputi rekonsiliasi secara rinci atas pembayaran yang dilakukan dan dilaporkan oleh sektor ekstraktif (selanjutnya disebut sebagai "perusahaan") dengan data pendapatan yang disediakan oleh berbagai Lembaga dan Lembaga Pemerintah RDTL (selanjutnya disebut sebagai "Lembaga-lembaga Pemerintah").

Tujuan dari pelaksanaan rekonsiliasi EITI ini adalah:

- mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam;

- memperkuat sistem pemerintahan dan perusahaan, menginformasikan melalui debat publik, dan meningkatkan kepercayaan;
- memberikan pengawasan dan memberikan informasi kepada rakyat RD TL mengenai pendapatan Pemerintah RD TL dari sumber daya alam negara mereka; dan
- mempromosikan keterbukaan mengenai bagaimana RD TL mengelola kekayaan sumber daya alamnya, dan menyakinkan bahwa sumber daya tersebut akan bermanfaat bagi semua warga negara.

1.3. Sifat dan lingkup pekerjaan

Rekonsiliasi dilakukan sesuai dengan Standar Internasional tentang Jasa-jasa Terkait yang berlaku mengikuti prosedur yang telah disepakati. Prosedur yang diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan (TOR) yang dilampirkan pada Kontrak Kerja nomor RFP / 01 / MPRM-2014 dan telah disetujui oleh MSG.

Temuan-temuan disajikan dalam laporan ini dan pada Lampiran. Prosedur rekonsiliasi yang dilakukan tidak dirancang untuk audit atau pemeriksaan sesuai dengan International Standards on Auditing atau International Standards on Review Engagements dan karena itu kami tidak menjamin apapun atas transaksi-transaksi di luar pernyataan eksplisit yang dikemukakan dalam laporan ini. Apabila kami melakukan prosedur-prosedur tambahan mengenai hal-hal lain yang menjadi perhatian kami, hal tersebut akan kami kemukakan dalam laporan ini.

Laporan ini menyajikan latar belakang, cakupan dan tujuan, metodologi serta pendekatan yang kami lakukan dalam proses rekonsiliasi. Laporan ini juga menyajikan rincian dari temuan-temuan, rekomendasi untuk perbaikan dan untuk proses rekonsiliasi dimasa depan.

Laporan ini menyajikan semua informasi yang berkaitan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang kami terima sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015. Informasi yang diterima setelah tanggal tersebut tidak disajikan dalam laporan kami. Konfirmasi yang diterima setelah tanggal tersebut dan tidak mempengaruhi data maupun hasil rekonsiliasi, kami sajikan dalam laporan ini.

2. RINGKASAN UNTUK EKSEKUTIF

2.1. Keterbatasan dalam pelaksanaan rekonsiliasi

Pekerjaan yang dilakukan diatur dalam TOR penugasan ini. Pekerjaan ini meliputi pengumpulan informasi yang terkait dari lembaga-lembaga pemerintahan. Namun, selama penugasan ini kami tidak dapat memperoleh informasi berikut yang berhubungan dengan sektor ekstraktif di RDTL:

- Data yang berkaitan dengan lapangan kerja di industri ekstraktif secara absolut dan secara persentase dari total lapangan kerja, karena data tersebut tidak diminta dalam template pelaporan.
- Data yang berkaitan dengan produksi Migas berdasarkan kelompok komoditas, karena data tersebut tidak diminta dalam template pelaporan.

Namun, kecuali untuk dampak dari hal-hal yang disebutkan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa laporan kami telah mencakup semua aspek lain dari Standard EITI.

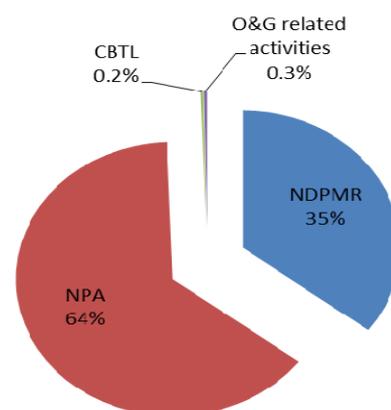
2.2. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif

Pendapatan RDTL yang dihasilkan dari Sektor Ekstraktif menurun sebesar **USD 529 juta** atau **15%**, dari **USD 3.583 juta** pada tahun 2012 menjadi **USD 3.054 juta** pada tahun 2013.

Tabel dibawah ini menyajikan perbedaan berdasarkan jenis pendapatan antara tahun 2012 dan 2013:

Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif	2013 Juta USD	2012 Juta USD	Beda Juta USD	%
National Directorate Petroleum and Minerals Revenue (NDPMR)	1.150	1.600	(450)	-28%
National Petroleum Authority (NPA)	2.093	2.181	(88)	-4%
Central Bank of Timor-Leste (CBTL)	8	9	(1)	-8%
Pendapatan dari kegiatan ekstraktif Migas	3.252	3.790	(538)	-14%
Pendapatan dari kegiatan yang berkaitan dengan Migas (Non ekstraktif)	11	10	1	9%
Pendapatan dari Sektor Migas	3.263	3.800	(537)	-14%
Pendapatan dari Sektor Pertambangan	0.04	0.04	(0.01)	-
Pendapatan dari Sektor Ekstraktif	3.263	3.800	(537)	-14%
Bagian pendapatan yang dialokasikan ke Australia	(209)	(217)	8	-4%
Bagian pendapatan yang dialokasikan ke RDTL	3.054	3.583	(529)	-15%

Perbedaan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembayaran yang diterima oleh NDPMR selama tahun 2013 (**-USD 450 juta**) terutama dari pajak tambahan yang menurun sebesar **USD 249 juta**. Kami mencatat bahwa struktur pendapatan sektor ekstraktif hampir sama dengan tahun 2012. Diagram dibawah ini menyajikan penerimaan dari sektor ekstraktif selama tahun 2013.



2.3. Data Produksi Minyak dan Gas

Produksi Migas turun sebesar **9.266.232 barel** atau **12,4%** antara tahun 2012 dan 2013. Tabel dibawah ini menyajikan secara ringkas produksi Migas selama tahun 2012 dan 2013 berdasarkan ladang minyak¹:

Ladang Minyak	2013	2012	Beda	
	Barel (BOE)	Barel (BOE)	Barel (BOE)	%
Bayu-Undan	59.319.171	60.866.794	(1.547.623)	-2.5%
Kitan	5.881.609	13.600.218	(7.718.609)	-56.8%
Total	65.200.780	74.467.012	(9.266.232)	-12.4%

Ladang Minyak Bayu-Undan

Seperti halnya dengan sumber daya minyak dan gas, benar terjadi penurunan produksi dari waktu ke waktu pada ladang minyak Bayu-Undan, terutama karena meningkatnya produksi air dari natural aquifer influx. Prediksi ConocoPhillips saat ini meliputi pengeboran sumur tambahan untuk menjaga keselarasan dengan Rencana Pembangunan Bayu-Undan dan kontrak gas jangka panjang Bayu-Undan hingga akhir 2022.

Ladang Minyak Kitan

Penurunan produksi ladang minyak Kitan terutama disebabkan *reservoir natural depletion* serta peningkatan produksi air.

Production "In Kind"

Tidak seperti negara-negara lain, alokasi produksi untuk tuan rumah dapat dalam bentuk *In-Kind*. Hasil produksi yang menjadi bagian RDTL dijual dalam mata uang Dollar Amerika.

Nilai Produksi

Nilai Produksi dalam barel setara minyak ditentukan berdasarkan harga realisasi rata-rata pada tahun 2013 terhadap total volume produksi untuk tahun buku yang bersangkutan.

Penting untuk dicatat bahwa nilai produksi adalah perkiraan kasar berdasarkan total produksi dikalikan dengan harga rata-rata. Perhitungan tersebut hanya memberikan nilai indikatif saja. Pendapatan yang sebenarnya disajikan dalam Bab 2.2 dari laporan ini.

Dalam websitenya, NPA telah menerbitkan *database Lafaek* yang berisi informasi mengenai produksi ladang minyak Bayu-Undan dan Kitan, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Informasi ini dapat diakses oleh publik. Beberapa kontrak tidak dipublikasikan pada website ini karena pertimbangan kerahasiaan tetapi penjelasan ringkasnya telah dipublikasikan pada *Jurnal de Republica*.

2.4. Kelengkapan dan akurasi data

- Skedule pembayaran yang dilakukan kepada Lembaga Pemerintah, dari setiap perusahaan, digunakan sebagai dasar rekonsiliasi kami. Semua pembayaran yang telah dipilih dan disetujui oleh MSG dimasukkan dalam rekonsiliasi.
- Daftar perusahaan ekstraktif yang dipilih oleh MSG untuk rekonsiliasi tahun 2013 terdiri dari 20 perusahaan Migas.
- 18 perusahaan Migas yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dan telah menyerahkan Template Pelaporan mereka, adalah sebagai berikut:

Perusahaan Migas	
Woodside Petroleum	Oilex Ltd
Eni JPDA 03-13 Ltd	ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd

¹ Sumber: NPA.

Perusahaan Migas	
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd
Eni Timor Leste S.p.A.	ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd
Talisman ReSumbers (JPDA 06-105) Pty Ltd	ConocoPhillips (03-19) Pty Ltd
Tokyo Timor Sea ReSumbers	ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd
Inpex Sahul Ltd	ConocoPhillips JPDA Pty Ltd
Inpex Timor Sea Ltd	AusAid
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	Timor Gap (11-106)

- 2 perusahaan Migas yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dan belum menyerahkan Template Pelaporan mereka, adalah sebagai berikut:

Perusahaan Migas	
Japan Energy Corporation	Minza Oil and Gas Ltd

- Semua Lembaga Pemerintah yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi telah menyerahkan Template Pelaporan mereka.
- Atas dasar ini, kami simpulkan bahwa Laporan ini telah mencakup semua pembayaran yang signifikan yang dilakukan, pada tahun 2013, oleh perusahaan ekstraktif sebagai pendapatan pemerintah RDTL.

2.5. Rekonsiliasi Pembayaran

- Selisih bersih antara pembayaran yang dilaporkan oleh perusahaan Migas dan Lembaga Pemerintah, pada awal rekonsiliasi sebesar **USD 8.549.069** atau **0,26%** dari jumlah yang dilaporkan oleh Pemerintah, rinciannya adalah sebagai berikut:

Jumlah dalam USD

	Perusahaan Migas	Lembaga Pemerintah	Beda	%
Total pembayaran yang dilaporkan	3.260.408.233	3.251.859.164	8.549.069	0,26%

- Pada akhir rekonsiliasi, selisih bersih yang tersisa adalah sebesar **USD (465.032)** atau **0,014%** dari total pembayaran yang dilaporkan oleh Pemerintah. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya Template Pelaporan yang tidak diserahkan oleh perusahaan ekstraktif.

Jumlah dalam USD

	Perusahaan Migas	Lembaga Pemerintah	Beda	%
Total pembayaran yang dilaporkan	3.251.498.861	3.251.963.893	(465.032)	-0.014%

- Setelah penyesuaian, selisih bersih sebesar **USD (465.032)** merupakan jumlah keseluruhan dari perbedaan positif sebesar **USD 19** dan perbedaan negatif sebesar **USD (465.051)** yang rinciannya dapat dilihat pada Bab 6.4 laporan ini.
- Rincian penyesuaian atas jumlah awal yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga serta nilai sisa yang belum terselesaikan dapat dilihat pada Bab 6.3 laporan ini
- Pada tabel dibawah ini kami sajikan ringkasan dari nilai sisa yang belum terselesaikan setelah dilakukan rekonsiliasi, untuk setiap perusahaan:

Jumlah dalam USD

Perusahaan	Perusahaan Migas	Lembaga Pemerintah	Beda
Minza Oil and Gas Ltd	-	429.368	(429.368)
Japan Energy Corporation	-	30.158	(30.158)
Non material differences relating to others companies	3.251.498.861	3.251.504.367	(5.506)
Total pembayaran	3.251.498.861	3.251.963.893	(465.032)

Perbedaan yang belum terselesaikan ini terutama disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak menyerahkan Template Pelaporannya, walaupun sudah diperingati berkali-kali.

- Pada tabel dibawah ini kami sajikan ringkasan perbedaan yang belum terselesaikan setelah dilakukan rekonsiliasi, untuk setiap jenis pembayaran pada setiap Lembaga Pemerintah:

Jumlah dalam USD

Sumber Pendapatan	Perusahaan Migas	Lembaga Pemerintah	Beda
National Directorate Petroleum and Minerals Revenue (NDPMR)	1.149.903.151	1.150.284.052	(380.901)
Income Tax	603.177.015	603.177.540	(525)
Value Added Tax (VAT)	17.400.822	17.607.462	(206.640)
Withholding Taxes	12.449.944	12.608.587	(158.643)
Additional Profit Tax (APT)	491.040.635	491.041.244	(609)
Other taxes (Employee wages)	8.640.735	8.654.678	(13.943)
Additional Taxes	17.194.000	17.194.540	(540)
National Petroleum Authority (NPA)	2.093.308.510	2.093.392.641	(84.131)
FTP Royalty : Oil / Gas & Profit Oil / Gas	2.088.395.220	2.088.399.351	(4.131)
JPDA - Development Fee	3.901.950	3.901.950	-
JPDA - Contract Service Fee	880.000	960.000	(80.000)
TLEA - License / Surface Rental Fee	131.340	131.340	-
Central Bank of Timor-Leste (CBTL)	8.287.200	8.287.200	-
Pipeline fee (AusAid)	8.287.200	8.287.200	-
Total Pembayaran	3.251.498.861	3.251.963.893	(465.032)

Tim Woodward
Partner
Moore Stephens LLP

150 Aldersgate Street
London EC1A 4AB

29 Desember 2015

3. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Sebelum meminta data untuk proses rekonsiliasi tahun 2013, kami telah mempelajari cakupan Laporan EITI yang telah disetujui oleh MSG. Kami juga menyiapkan petunjuk tertulis mengenai cara mengisi dan menyerahkan Template Pelaporan.

3.1. Rapat pembukaan

Tugas kami dimulai pada tanggal 22 September 2014 dengan rapat pembukaan bersama Sekretariat RDTL-EITI, dimana kami:

- membahas tujuan dari penugasan;
- meminta semua dokumen dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penugasan;
- membuat jadwal wawancara yang akan dilakukan dengan orang-orang yang berperan penting di Lembaga Pemerintah dan perusahaan ekstraktif.

3.2. Tahap Awal

Sesuai dengan kerangka acuan, kami melakukan analisa awal dari proses pelaporan EITI untuk memastikan bahwa ruang lingkup itu telah didefinisikan dengan jelas, termasuk Template Pelaporan, prosedur pengumpulan data, serta jadwal penerbitan Laporan EITI. Analisa awal kami meliputi:

- batas materialitas penerimaan dan pembayaran;
- pajak-pajak dan pendapatan-pendapatan yang akan dilaporkan;
- perusahaan-perusahaan dan Lembaga-lembaga Pemerintah yang akan dilaporkan; dan
- jaminan untuk memastikan kredibilitas data yang diserahkan kepada kami oleh perusahaan-perusahaan.

3.2.1. Pertemuan dengan Pemerintah dan Perusahaan

Kami mewawancarai para pejabat kunci Lembaga Pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Selama pertemuan ini, kami jelaskan bahwa tahap ini merupakan tahap pemahaman dan untuk mendokumentasikan berapa besar industri ekstraktif di RDTL, mempelajari pelaksanaan dan sistem pajak yang berlaku serta arus pembayaran dalam industri ekstraktif, termasuk mengidentifikasi semua perusahaan ekstraktif dan Lembaga Pemerintah yang terlibat.

Selain itu, kami dapat mengidentifikasi berbagai pajak yang dibayar oleh perusahaan ekstraktif, sifat informasi yang tersedia dalam berbagai badan pemerintahan dan prosedur yang dilaksanakan. Pemerintah dan lembaga publik yang kami hubungi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Organisation	Nama	Jabatan
RDTL-EITI Secretariat	Elda Guterres da Silva	National Coordinator
	Trifonio Flor Sarmento	Outreach Officer
	Ana Paula de Araujo	Assistant Administration
	Sonia do Rosario Boavida	Administration Officer
Ministry Petroleum and Mineral ReSumbers (MPMR)	Alfredo Pires	Minister of Petroleum and Mineral ReSumbers
	Elga Anita Torrezao Pereira	Director National of Mineral
National Petroleum Authority (NPA)	Emanuel Angelo Lay	Commercial Director
	Oscar Sanches Faria	Senior Officer - Finance & Fiscal Assurance
National Directorate Petroleum and Minerals Revenue (NDPMR)	Agostinho Gregorio Ramos	Senior staff and Head of Compliance Department
	Filipe Nery Bernardo	Petroleum Fund Analysis
Central Bank of Timor-Leste (CBTL)	Fernando da Silva Carvalho	Chief Accountant
General Directorate of Statistics (GDS)	Paulina Rita Cruz Viegas	National Director of Economic and Social Statistics

Kami juga mengadakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sektor Migas di RDTL serta membahas jenis pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah dan prosedur yang dilaksanakan untuk persiapan pelaporan pajak dan mengumpulkan penerimaan pajak. Kami juga mengkaji masalah yang dihadapi selama pelaksanaan rekonsiliasi pada tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan bahwa informasi yang diminta dalam template pelaporan akan tersedia.

Perusahaan-perusahaan yang dikunjungi selama tahap awal ini adalah sebagai berikut:

Organisation	Nama	Jabatan
Woodside	Antonio Campos dos Santos	Country Representative and Community Relations Advisor
Eni	Angelina Baptista Branco	Country Representative
	Luis Martins	Director of Business & Development
Timor-Gap	Jacinta Paula Bernardo	Director of Corporate Service
	Francisco Alegria	Public Relation Advisor to the President & CEO

3.2.2. Pengumpulan data dan analisa data

Setelah mewawancarai perusahaan-perusahaan seperti yang disebutkan diatas, kami memperoleh data yang merupakan dasar dari analisa awal kami untuk sektor ekstraktif di RDTL.

Dalam rangka untuk memahami dan mendokumentasikan besarnya sektor ekstraktif di RDTL, sistem perpajakan dan arus pembayaran, kami mengumpulkan dokumen yang relevan dan memperoleh pemahaman mengenai hal-hal berikut ini:

- undang-undang yang berlaku untuk sektor ekstraktif;
- struktur dan besarnya sektor ekstraktif di RDTL, dan stakeholders yang utama;
- statistik dan indikator keuangan sektor ekstraktif dalam hal produksi dan besarnya kontribusi terhadap pendapatan RDTL;
- semua perubahan yang terjadi selama periode rekonsiliasi yang berkaitan dengan undang-undang, kontrak baru atau perjanjian yang dapat mempengaruhi sektor ekstraktif; dan
- kesimpulan dan masalah utama yang ditonjolkan dalam laporan rekonsiliasi sebelumnya.

Untuk mengidentifikasi semua arus pembayaran serta semua lembaga yang terkait dalam sektor ekstraktif, kami melakukan hal-hal berikut ini:

- mengumpulkan semua penerimaan yang diterima oleh Negara dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif;
- melakukan rekonsiliasi data yang dikumpulkan dari perusahaan ekstraktif tertentu dengan data yang diperoleh dari Lembaga Pemerintah;
- memeriksa daftar perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan semua data tersebut dapat dibandingkan;
- menggabungkan pendapatan yang diperoleh Lembaga-lembaga Pemerintah berdasarkan jenis pendapatan serta perusahaan; dan
- melakukan analisa materialitas untuk melihat dampak dari hasil penggabungan tersebut.

3.3. Proses Rekonsiliasi

3.3.1. Pengumpulan Data

Sebuah Template Pelaporan yang telah disiapkan dan telah disetujui oleh MSG, dikirim ke perusahaan-perusahaan ekstraktif dan Lembaga-lembaga Pemerintah, untuk meminta data yang diperlukan. Template Pelaporan ini dikirim melalui email oleh Pelaksana Rekonsiliasi yang independen kepada para stakeholder. Perusahaan-perusahaan dan Lembaga-lembaga Pemerintah diminta untuk melaporkan langsung kepada pelaksana rekonsiliasi, dan jika ada pertanyaan mengenai Template Pelaporan, dapat langsung menanyakannya kepada Pelaksana Rekonsiliasi.

3.3.2. Kompilasi data dan penyelesaian perbedaan

Proses kompilasi data serta penyelesaian atau mencocokkan perbedaan-perbedaan dilakukan selama bulan November dan Desember 2014. Prosedur yang kami lakukan dalam melaksanakan rekonsiliasi ini adalah sebagai berikut:

- Membandingkan, item by item, angka-angka yang dilaporkan oleh perusahaan Migas dengan angka-angka yang dilaporkan oleh Lembaga-lembaga Pemerintah. Hasilnya adalah daftar semua perbedaan, item by item, untuk setiap Lembaga Pemerintah dan perusahaan ekstraktif yang terkait;
- jika data yang dilaporkan oleh perusahaan Migas cocok dengan data yang dilaporkan oleh Lembaga Pemerintah, data Pemerintah dianggap sudah dikonfirmasi dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan; dan
- Lembaga Pemerintah dan Perusahaan diminta untuk memberikan dokumen pendukung dan/atau konfirmasi untuk setiap penyesuaian atas informasi yang dilaporkan pada template pengumpulan data awal.

Untuk tujuan pekerjaan rekonsiliasi, kami telah menentukan batas ambang USD 10 ribu sebagai batas perbedaan material untuk setiap transaksi keuangan. Semua perbedaan melebihi jumlah tersebut akan diselidiki dan didiskusikan dengan perusahaan pelapor sehingga diperoleh keputusan hasil analisa dan penyesuaian.

Dalam kasus dimana kami tidak dapat menyelesaikan perbedaan, kami meminta dokumen pendukung tambahan sebagai bukti pembayaran yang telah dilaporkan. Dalam kasus-kasus tertentu, perbedaan-perbedaan tersebut belum terpecahkan, dan telah kami rangkum dalam Bab 6.4 laporan ini.

3.4. Reliabilitas dan Kredibilitas data EITI

Untuk memenuhi standar EITI dan untuk menjamin reliabilitas dan kredibilitas data yang dilaporkan:

- perusahaan-perusahaan dan Lembaga-lembaga Pemerintah diminta untuk menyerahkan Template Pelaporan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Senior sebagai penegasan bahwa template pelaporan dibuat berdasarkan catatan yang akurat; dan
- semua pendapatan yang dilaporkan oleh Lembaga-lembaga Pemerintah dicocokkan dengan berbagai laporan audit yang dihasilkan dalam kaitannya dengan Sektor Minyak di RDTL.

Atas dasar ini, kami dapat menyimpulkan bahwa Laporan ini mencakup informasi yang dapat dipercaya dan kredibel sehubungan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor ekstraktif di Timor-Leste.

3.5. Dasar Pelaporan

Rekonsiliasi telah dilaksanakan berdasarkan transaksi tunai (*cash basis*). Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2013 tidak dilaporkan. Hal yang sama juga berlaku untuk pembayaran yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2013.

4. GAMBARAN SEKTOR EKSTRAKTIF DI RDTL

4.1. Sektor Migas

4.1.1. Latar belakang dan profile sektor Migas di RDTL

RDTL secara resmi memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002. Kemerdekaan RDTL merupakan hasil referendum pada bulan Agustus 1999 yang disponsori oleh PBB. Sebelum tahun 2002, pemerintahan RDTL diambil alih oleh PBB melalui Pemerintahan Transisi PBB di Timor Leste (UNTAET). Selama masa transisi, UNTAET mewakili pemerintah RDTL melakukan negosiasi kembali mengenai pembagian sumber daya minyak bumi dalam kawasan Joint Petroleum Development Area (JPDA).

Pada tahun 2003, RDTL dan Australia membuat Perjanjian Laut Timor (Timor Sea Treaty atau TST) yang memberikan batasan untuk semua eksplorasi minyak bumi dan pembangunan di Kawasan JPDA. TST mengizinkan adanya pembagian pendapatan pajak hulu dari produksi minyak bumi di Kawasan JPDA antara Timor-Leste dan Australia sebesar 90/10.

TST membuat Panitia Bersama (Joint Commission atau JC) untuk menetapkan kebijakan dan peraturan mengenai kegiatan perminyakan di Kawasan JPDA, bersamaan dengan didirikannya Timor Sea Designated Authority (TSDA). Yang kemudian menggantikan Zone Cooperation Area (ZOCA) dalam periode Celah Timor (Timor Gap).

TSDA dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif untuk mengelola kegiatan perminyakan di Kawasan JPDA. Anggota Komisi Bersama minimal terdiri dari satu wakil warga Australia dan dua wakil warga Timor Leste.

Badan Perminyakan Nasional (National Petroleum Authority atau NPA) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan n° 20/2008. Lembaga publik ini mengelola semua kegiatan eksplorasi minyak bumi pada kedua kawasan eksplorasi, yaitu JPDA dan TLEA (Timor Leste Exclusive Area).

4.1.2. Dasar Hukum

Sektor Migas RDTL terdiri dari 2 (dua) wilayah yang berbeda dengan kerangka hukumnya masing-masing: TLEA dan JPDA.

Kerangka hukum yang berlaku pada setiap kawasan kami rangkum pada Tabel di bawah ini:

Wilayah Hukum	TLEA	JPDA
Gambaran Umum	TLEA mengacu pada wilayah RDTL seperti yang didefinisikan dalam UU Perminyakan RDTL (UU No.13 / 2005). Hukum ini menyatakan bahwa kegiatan perminyakan di wilayah laut, bersama dengan zona ekonomi eksklusif dan lempengan kontinentalnya di mana, berdasarkan hukum internasional, RDTL memiliki hak berdaulat untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak tapi tidak termasuk di wilayah daratan.	TST antara Pemerintah RDTL dan Australia pada tahun 2002 mendirikan JPDA di Laut Timor. Berdasarkan Perjanjian, RDTL dan Australia bersama-sama mengontrol, mengelola dan memfasilitasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak bumi di JPDA untuk kepentingan rakyat RDTL dan Australia.
Dasar hukum utama untuk kegiatan perminyakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petroleum Activities Law (Law N°13/2005) 2. National Petroleum Authority (NPA) (Decree-Law N°2/2008) 3. Public Tendering in Respect of Petroleum Contracts Award (Decree-Law N°7/2005) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. TST 2. Interim Petroleum Mining Code (IPMC) 3. Petroleum Mining Code (PMC) 4. Interim Regulations issued under Article 37 of the Interim Petroleum Mining Code 5. Interim Directions issued under Article 37 of the Interim Petroleum Mining Code 6. Interim Administrative Guidelines for the JPDA 7. Greater Sunrise - International Unitisation Agreement 8. Greater Sunrise - Memorandum of Understanding 9. Certain Maritime Arrangement In The Timor Sea Treaty (CMATS)

Wilayah Hukum	TLEA	JPDA
Kontrak bagi hasil (PSC) yang ada	Block E PSC (PSC S06-04)	JPDA PSC 06-101 A / JPDA PSC 06-103 / JPDA PSC 06-105 / JPDA PSC 11-106 / JPDA PSC 03-12 / JPDA PSC 03-13 JPDA PSC 03-19 / JPDA PSC 03-20

National Petroleum Authority (NPA) (Surat Keputusan N°2/2008)¹

Mengingat sumber daya minyak bumi yang dimiliki oleh RDTL merupakan komponen ekonomi yang strategis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jika sumber daya ini dikelola dengan baik, akan menghasilkan pendapatan yang signifikan dan memberikan manfaat langsung bagi perekonomian negara. Pemerintah RDTL mendirikan NPA dalam rangka membangun serta mengawasi kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku yang mencakup kegiatan eksplorasi, pengembangan, produksi, transportasi dan distribusi sumber daya minyak bumi dan gas alam.

NPA adalah lembaga publik yang diberi otonomi administrasi dan keuangan, anggaran dan hak kepemilikan sendiri, yang patuh pada kerangka peraturan yang mengatur administrasi keuangan lembaga otonomi yang membiayai dirinya sendiri. Tujuan NPA adalah sebagai badan pengawas untuk Migas serta industri dari produk-produk terkait, sesuai dengan ketentuan hukum kegiatan perminyakan, PMC dan TST.

NPA telah menyusun peraturan teknis lepas pantai di Kawasan TLEA untuk memastikan pedoman yang tepat pada Keselamatan Kesehatan dan Lingkungan serta keselamatan kegiatan. Pada sektor hilir, NPA juga telah menyelesaikan Dekrit Hukum kegiatan Hilir, Peraturan yang berkaitan dengan bisnis hilir.

Pada bulan Oktober 2013, telah diberikan lisensi Eksplorasi baru kepada ENI JPDA 11-106 BV di JPDA ^(a). Operator di kedua yurisdiksi kebanyakan difokuskan pada 3D seismik, Geologi dan studi Geofisika.

^(a) Catatan Singkat tentang bagaimana PSC 11-106 diberikan

Sektor minyak dan gas di Timor-Leste terdiri dari dua yurisdiksi yang berbeda, yaitu Area Eksklusif di Timor-Leste (TLEA) dan Joint Petroleum Development Area (JPDA). PSC 11-106 adalah bidang minyak lepas pantai yang terletak di daerah JPDA. Pada bulan Oktober 2013, PSC diberikan kepada ENI JPDA 11-106 BV sebagai operator (yang didirikan berdasarkan Undang-undang Belanda) dan usaha patungan seperti Inpex Lepas Pantai Timor-Leste. Ltd (didirikan berdasarkan Undang-undang Jepang). dan Timor Gap PSC 11-106 Unipessoal Limitada (National Oil Company/Perusahaan Minyak Nasional). Setiap perusahaan memiliki saham sebagai berikut: ENI 40,533%. Inpex 35,467% dan Timor Gap 24%.

Dasar untuk pemberian PSC ini terutama karena ENI sebagai operator kawasan Kitan, PSC 06-105, wajib menyerahkan wilayah eksplorasi. Sesuai dengan kontrak, daerah eksplorasi diluar daerah pengembangan harus dilepaskan. Namun, kontrak yang ada tidak memungkinkan ENI untuk terus mempertahankan wilayah tersebut. ENI - sebagai pemegang awal dari area kontrak - telah mengidentifikasi daerah yang dilepaskan sebagai daerah prospektif untuk pengembangan lebih lanjut.

ENI mendekati ANP pada awal 2012, menunjukkan minat untuk mengembangkan daerah eksplorasi yang dilepaskan dari Kitan PSC. Kedua belah pihak mulai bekerja pada "term sheet" di pertengahan 2012 yang menghasilkan kesepakatan mengenai syarat dan kondisi dalam rancangan negosiasi PSC.

Salah satu alasan ANP menyerahkan PSC kepada ENI, karena pertimbangan bahwa ENI telah lama bekerja diarea ini dan memahami dengan baik sistem geologi dan minyak bumi di JPDA. Selain itu, partisipasi TIMOR GAP E.P di PSC dapat dianggap sebagai tonggak bersejarah untuk kemajuan Perusahaan Minyak Nasional.

Dengan persetujuan dari Komisaris Bersama, PSC diberikan pada bulan April 2013, dimana dalam 60 hari Kkontraktor harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya. Tanggal 22 Oktober 2013 dinyatakan sebagai tanggal PSC menjadi efektif setelah Kontraktor memenuhi seluruh persyaratan seperti Joint Operating Agreement, penunjukan operator pelaksana, asuransi serta jaminan dari perusahaan induk.

¹ Sumber: Undang-undang n°2/2008 mengenai NPA.

Saat ini, PSC 11-106 masih pada tahap eksplorasi. Dua prospek utama telah diidentifikasi sebagai pusat untuk pembangunan masa depan dimana wilayah-wilayah yang terpisah (satellite fields) akan dihubungkan kembali dengan pusat utama (Main hub).

Database Lafaek NPA telah dipublikasikan dan dapat diakses sejak tahun 2008. Database ini berisi informasi mengenai kontrak, koordinat kawasan lisensi, masa berlakunya lisensi, termasuk data produksi yang diperbaharui setiap minggunya. Untuk tujuan keterbukaan, situs NPA dapat diakses oleh publik.

Lelang publik untuk menentukan kontrak perminyakan di Kawasan TLEA

Surat Keputusan N° 7/2005 mengesahkan prosedur umum dalam melakukan lelang publik untuk menentukan kawasan kontrak dan mendaftarkan kontrak perminyakan. Tabel di bawah ini merangkum ketentuan utama dekrit hukum tentang Tender Publik sehubungan dengan Kontrak Perminyakan:

Referensi	Ketentuan Utama/Penjelasan
Pasal 3 Kontrak Perminyakan	1. kontrak Perminyakan yang ditandatangani oleh perusahaan dan /atau kelompok perusahaan harus berbentuk Kontrak Bagi Hasil (PSC).
Pasal 4 Penawaran	1. perusahaan dan /atau kelompok perusahaan harus dipilih berdasarkan penawaran yang diajukan.
Pasal 6 Pemberitahuan kepada umum melalui iklan	1. Peluncuran pelelangan umum sehubungan dengan penentuan kontrak minyak bumi harus diiklankan dalam pemberitahuan publik yang bersifat sementara, yang akan diterbitkan dalam Lembaran Negara, dan di media jika dianggap perlu oleh Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral dan Kebijakan Energi, selambat-lambatnya 15 hari sebelum peluncuran tender tersebut. 2. pemberitahuan final dan pasti, harus diumumkan dalam Lembaran Negara, dan di media jika dianggap perlu oleh MPRM, paling lambat 45 hari sebelum batas waktu untuk mengajukan penawaran.
Pasal 8 Komite Pengkajian	1. Penilaian atas penawaran yang diajukan harus dilakukan oleh Komite Pengkajian ("Komite") dengan jumlah anggota komite yang ganjil, tidak kurang dari 5 anggota dan tidak lebih dari 9 anggota. 2. Anggota Komite ditunjuk oleh MPRM dan harus mengikut sertakan Direktur Petroleum, Gas dan Energi. 3. Keputusan Komite dibuat dalam rapat pleno dengan suara mayoritas, dengan persyaratan dua pertiga dari jumlah suara.
Pasal 12 Pemberitahuan dan publikasi	1. Hasil penilaian dari penawaran diberitahukan kepada penawar dalam waktu 3 hari kerja dari tanggal laporan disetujui. 2. Keputusan disetujuinya laporan, catatan singkat tentang hasil penilaian dari penawaran dan ringkasan substansial dari laporan tersebut harus diumumkan dalam Lembar Negara, dan di media jika dianggap perlu oleh MPRM, dalam waktu 10 hari kerja dari tanggal laporan disetujui.
Pasal 13 Tantangan	1. Peserta Lelang untuk wilayah kontrak tertentu dapat mengajukan klaim terhadap putusan yang sudah disetujui mengenai daerah kontrak tersebut pada MPRM, dan klaim tersebut harus dilakukan dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal publikasi. 2. Klaim diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan alasannya. 3. Semua peserta lelang lainnya untuk wilayah kontrak harus diberitahu tentang isi klaim agar mereka dapat, jika mereka ingin, membuat pernyataan dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut. 4. Keputusan mengenai klaim harus dilakukan dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal berakhirnya batas waktu seperti yang tercantum dalam ayat 13.3. dengan menyebutkan alasan untuk itu dan mencakupi klaim dan/atau tuduhan yang mungkin telah dilakukan oleh penawar lainnya. 5. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 13.4. dan dengan alasan untuk itu, diumumkan dalam Lembar Negara, dan di media jika dianggap perlu oleh MPRM, dalam waktu 15 hari kerja sejak tanggal keputusan dibuat.

Perjanjian Laut Timor (TST) yang mengatur tentang *Joint Petroleum Development Area (JPDA)*

TST ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2002 dan dibentuk JPDA. RDTL dan Australia bersama-sama mengontrol, mengelola dan memfasilitasi kegiatan eksplorasi, pengembangan dan eksploitasi sumber daya minyak bumi di Kawasan JPDA untuk kepentingan rakyat RDTL dan Australia. Tabel di bawah ini merangkum pasal-pasal utama yang terkait dengan TST:

Referensi	Ketentuan Umum/Penjelasan
Pasal 4: Bagi hasil produksi minyak bumi	RDTL dan Australia memiliki hak atas semua minyak yang diproduksi di Kawasan JPDA dimana 90% akan menjadi milik Timor Leste dan 10% akan menjadi milik Australia.

Referensi	Ketentuan Umum/Penjelasan
Pasal 22: Durasi dari Perjanjian	TST akan berlaku sampai ada batas dasar laut permanen antara RDTL dan Australia atau selama 50 ¹ tahun sejak tanggal berlakunya, mana yang lebih cepat. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara RDTL dan Australia.

Interim Petroleum Mining Code (Interim PMC)

Interim PMC mengatur kegiatan perminyakan di Kawasan JPDA. Terlepas dari kenyataan bahwa PMC didirikan, Interim PMC terus mengatur PSC berikut ini:

PSC	Operator	Jatuh Tempo ²
03-12	ConocoPhillips	06/02/2022
03-13	ConocoPhillips	17/12/2021
03-19	Woodside Petroleum	03/10/2026
03-20	Woodside Petroleum	15/11/2026

Tabel di bawah ini menyajikan pasal-pasal utama yang terkait dengan interim PMC:

Referensi	Ketentuan Umum/Penjelasan
Pasal 4 Hak yang diberikan oleh kontrak	PSC juga menentukan bahwa dalam waktu 30 hari setelah akhir setiap tahun kalender, kontraktor dan Otoritas yang ditunjuk untuk melakukan penyesuaian dan menyelesaikan pembayaran berdasarkan kuantitas, nilai dan harga yang aktual, untuk memastikan bahwa Otoritas yang ditunjuk menerima hasil produksi minyak bumi yang benar pada setiap tahun kalender.
Pasal 17 Ijin untuk memproduksi minyak bumi	Operator kontrak tidak boleh membangun struktur produksinya tanpa ijin dari Otoritas yang ditunjuk. Otoritas yang ditunjuk tidak boleh menahan perijinan.
Pasal 18 Ijin untuk membangun pipa	Operator kontrak tidak boleh membangun pipa untuk menyalurkan minyak bumi didalam atau dari Kawasan JPDA tanpa ijin dari Komisi Bersama (<i>Joint Commission</i> atau JC), dan operator kontrak juga tidak boleh menggunakan atau memindahkan pipa tanpa ijin JC.
Pasal 32 Ijin untuk melakukan pencarian	Otoritas yang ditunjuk dapat mengeluarkan ijin prospek kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak bumi di blok yang bukan berada di daerah kontrak. Ijin prospek akan menentukan syarat-syarat yang harus diikuti oleh orang tersebut. Syarat-syarat ijin prospek tidak termasuk preferensi atau hak untuk mendapatkan kontrak pada blok-blok tersebut. Semua laporan data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut harus diserahkan kepada Otoritas yang ditunjuk dan dapat digunakan secara gratis.
Pasal 41 Audit pembukuan dan laporan milik kontraktor	Pembukuan dan laporan kontraktor harus diaudit oleh Otoritas yang ditunjuk, yang harus dilakukan setiap tahun. Otoritas yang ditunjuk dapat mengeluarkan peraturan dan petunjuk sehubungan dengan audit pembukuan dan laporan.
Pasal 48 Berakhirnya kontrak	Jika kontraktor tidak dapat mematuhi ketentuan PMC, peraturan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Otoritas yang ditunjuk, atau persyaratan kontrak, Otoritas yang ditunjuk dapat merekomendasikan kepada JC untuk menghentikan kontrak. Otoritas yang ditunjuk akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada kontraktor mengenai niatnya untuk memberikan rekomendasi pemutusan kontrak dalam waktu 30 hari.

Petroleum Mining Code (PMC)

PMC disahkan sesuai dengan Pasal 7 (a) dari TST untuk mengatur kegiatan eksplorasi, pengembangan dan eksploitasi Minyak dalam Kawasan JPDA, serta ekspor Petroleum dari Kawasan JPDA. PMC menghapus Interim PMC yang hanya digunakan dalam kaitannya dengan PSC tersebut di atas.

Proses pemberian kontrak mirip dengan yang dilakukan oleh Interim PMC tetapi dengan perubahan sebagai berikut:

- Proposal pemohon harus berkaitan dengan Kesehatan, Keselamatan serta Lingkungan; dan
- Proposal pemohon harus berkaitan dengan Pelatihan dan Ketenagakerjaan serta Barang dan Jasa lokal.

¹ Durasi ini pada awalnya adalah 30 tahun. Namun telah diperpanjang sampai 50 tahun berdasarkan beberapa kesepakatan kelautan di laut Timor (*Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* atau *CMATS*), Pasal 3.

² Sumber: Interim Petroleum Mining Code, Pasal 7.

Jika tidak, PMC tidak akan memberikan jumlah biaya yang bertentangan dengan Interim PMC.

Greater Sunrise - International Unitisation Agreement (IUA)

The Greater Sunrise IUA mengatur kegiatan perminyakan di Unit Area dan Unit Reservoirs¹: Sunrise and Troubadour deposits (yang dikenal dengan nama Greater Sunrise).

Tabel di bawah ini merangkum pasal-pasal utama yang terkait dengan Greater Sunrise IUA:

Referensi	Ketentuan Umum/Penjelasan
Pasal 7 Pembagian Unit Petroleum	Hasil produksi Minyak dari Unit Reservoirs harus dibagi antara JPDA dan Australia berdasarkan rasio 20,1/79,9 dan masing-masing 20,1.
Pasal 4 Penerapan Hukum	(a) TST dianggap berlaku untuk kegiatan perminyakan di dalam Kawasan JPDA dan kegiatan perminyakan yang berkaitan dengan Kawasan JPDA sesuai dengan Rasio Pembagian; (b) undang-undang Australia dianggap berlaku untuk kegiatan perminyakan yang berkaitan dengan Australia sesuai dengan Rasio Pembagian.
Pasal 11 Penerapan Pajak dalam kaitannya dengan Satuan Properti	Untuk keperluan perpajakan perusahaan, perpajakan sumber daya, penggantian biaya dan bagi hasil dalam kaitannya dengan Unit Properti: (a) penerimaan dan pengeluaran untuk bagian produksi yang berkaitan dengan JPDA sesuai dengan Rasio Pembagian akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam Perjanjian Laut Timor dan di tempat lain dalam IUA; (b) penerimaan dan pengeluaran untuk bagian produksi berkaitan dengan Australia sesuai dengan Rasio Pembagian akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dalam negeri Australia.
Pasal 12 Rencana Pembangunan	Produksi minyak bumi tidak akan dimulai sampai berlakunya Rencana Pembangunan untuk kegiatan eksploitasi Unit Reservoirs, yang telah disampaikan oleh Unit Operator dan berisi program serta rencana yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Joint Ventures, dan telah disetujui oleh Otoritas Regulator. Unit Operator harus mengirimkan salinan Rencana Pembangunan ke Badan Pengawas untuk disetujui.

Greater Sunrise – Nota Kesepakatan (MOU)

MOU Greater Sunrise menetapkan besarnya pembayaran yang berkaitan dengan unitisasi dari Greater Sunrise yang akan ditransfer oleh Pemerintah Australia kepada Pemerintah RDTL. Tabel dibawah ini menyajikan besarnya biaya yang harus dibayar²:

Tanggal pelunasan biaya	Biaya dalam USD	Catatan	Frekwensi	Penjelasan
Pada awal pembangunan fasilitas di Unit Area	1 juta	Dapat dibayar dalam mata uang lainnya yang jumlahnya sama dengan nilai dalam Dolar Amerika ditambah <i>service charge</i> .	Tahunan	Pembayaran biaya ini dimulai pada tahun dimana instalasi fasilitas untuk keperluan produksi di Unit Area sudah dimulai atau lima tahun sebelum produksi di Unit Area dijadwalkan seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan. Biaya ini harus dibayar setiap tahun, sampai dengan dimulainya produksi dan selama produksi di Unit Area.
Pada awal produksi di Unit Area	10 juta	Dapat dibayar dalam mata uang lainnya yang jumlahnya sama dengan nilai dalam Dolar Amerika ditambah <i>service charge</i> .	Tahunan	Pembayaran biaya ini dimulai pada tahun kalender di mana produksi di Unit Area sudah dimulai, seterusnya setiap tahun tetapi tidak termasuk tahun kalender di mana produksi di Unit Area dihentikan.

Certain Maritime Arrangement di laut Timor (CMATS)

CMATS adalah ketetapan yang dibuat antara RDTL dan Australia dalam kaitannya dengan eksplorasi minyak bumi di Laut Timor setelah TST dan IUA. Seperti disebutkan di atas, TST didirikan JPDA. Salah satu penemuan besar di Laut Timor adalah ladang Greater Sunrise yang memiliki sekitar 20% dari cadangan dalam JPDA (lihat PSC 03-19 dan 03-20 PSC) dan sekitar 80% dari cadangan luar JPDA didalam lisensi Australia. IUA dan CMATS secara khusus menangani bidang Greater Sunrise. IUA berkaitan dengan unitisasi dari Greater Sunrise di beberapa daerah lisensi sebagaimana diatur di

¹ Unit Area dan Unit Reservoirs maksudnya adalah area yang digambarkan pada Lampiran I the Greater Sunrise - International Unitisation Agreement (IUA).

² Menurut NPA, hingga saat ini, tidak ada pendapatan yang diterima dari pemerintah Australia.

atas. Berdasarkan CMATS kedua negara sepakat bahwa pendapatan dari eksplorasi Greater Sunrise akan dibagi sama dan untuk menunda diskusi mengenai garis perbatasan. Kawasan ini masih belum produksi.

Dana Perminyakan (*Petroleum Fund* atau PF)

PF dibentuk pada tahun 2005 sehubungan dengan Undang-undang Dasar RDTL Pasal 139 yang berkaitan dengan sumber daya alam. PF akan memberikan kontribusi kepada manajemen sumber daya minyak bumi secara bijaksana untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. PF akan menjadi alat yang dapat memberikan kontribusi kepada kebijakan fiskal yang berwawasan, dimana semuanya dipertimbangkan demi kepentingan jangka panjang rakyat Timor-Leste¹.

Tabel di bawah ini merangkum pasal-pasal utama yang berkaitan dengan Undang-undang PF:

Referensi	Ketentuan Umum/Penjelasan
	Pemasukan uang PF berasal dari:
Pasal 6 Pemasukan PF	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan bruto, termasuk Pajak Pendapatan RDTL dari setiap kegiatan perminyakan, termasuk tahap prospeksi atau kegiatan eksplorasi, dan pengembangan dan eksploitasi, transportasi, penjualan atau ekspor minyak, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengannya. b. Setiap uang yang diterima oleh RDTL dari Otoritas yang Ditunjuk harus berdasarkan Perjanjian. c. Setiap uang yang diterima oleh RDTL dari hasil Investasi dana perminyakan. Setiap uang yang diterima oleh RDTL dari partisipasi RDTL dalam kegiatan perminyakan secara langsung maupun tidak langsung. d. Setiap uang yang diterima oleh RDTL yang berkaitan langsung dengan sumber daya minyak bumi yang tidak tercakup dalam butir a dan b di atas.
Pasal 7 Transfer	<p>Jumlah yang ditransfer dari PF pada tahun fiskal tidak akan melebihi jumlah yang telah disetujui oleh Parlemen untuk Tahun Anggaran. Perkiraan Pendapatan yang Berkelanjutan (<i>Estimated Sustainable Income</i> atau ESI) untuk tahun fiskal adalah jumlah maksimum yang berasal dari PF pada tahun fiskal yang bersangkutan.</p> <p>ESI = Kekayaan Petroleum * 3%</p>

Struktur pengelolaan PF disajikan sebagai²:



4.1.3. Produksi

Pada akhir tahun 2013, ada dua wilayah produksi di JPDA, sementara di TLEA, belum ada produksi komersial.

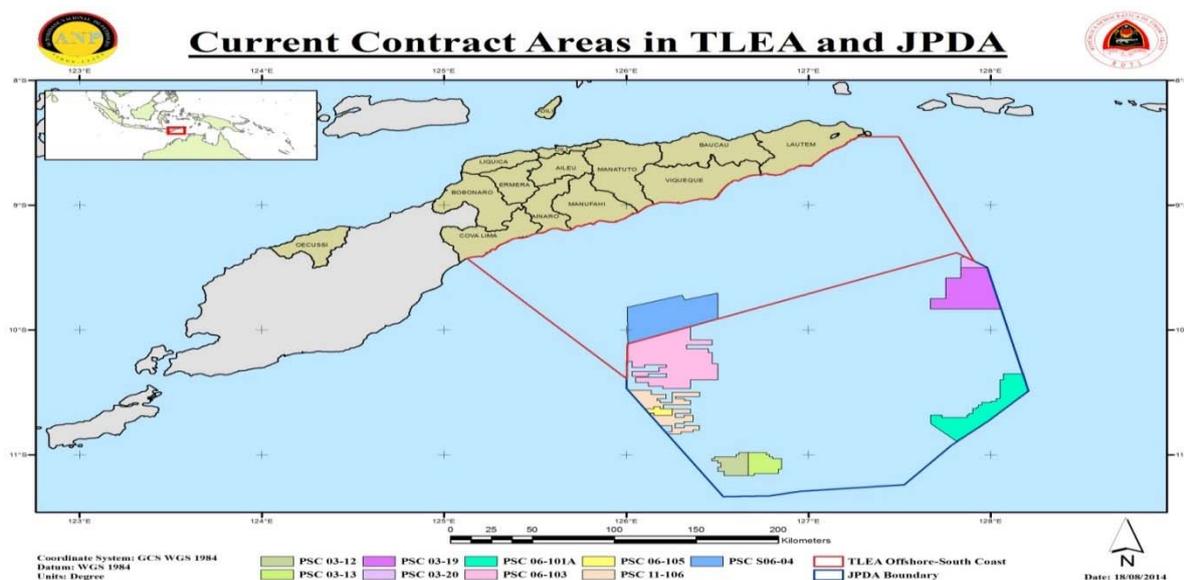
Tabel di bawah ini menyajikan karakteristik dari kedua kawasan produksi:

N°	Kawasan	Operator	Joint Venture dengan
1	Bayu-Undan	ConocoPhillips	ENI / Santos / INPEX / Tokyo Timor Sea ReSumbers Pty
2	Kitan	Eni	INPEX Timor Sea Ltd / Talisman ReSumbers Pty Ltd

¹ Sumber: Undang-undang n°9/2005 tanggal 3 Agustus 2005 mengenai Dana Perminyakan.

² Sumber: Laporan Tahunan Dana Perminyakan tahun 2013.

Peta dibawah ini menyajikan *contract area* di kawasan TLEA dan JPDA pada akhir tahun 2013:



4.1.4. Kontribusi sektor Migas pada perekonomian RDTL¹

PDB RDTL bergantung pada pendapatan dari Migas. Tabel di bawah menyajikan pertumbuhan PDB RDTL dari setiap sektor:

Data PDB	2013		2012		Beda	
	Juta USD	%	Juta USD	%	Juta USD	%
PDB sektor Perminyakan	4.276	76%	5.512	81%	(1.236)	-22%
PDB sektor non-Perminyakan	1.319	24%	1.295	19%	24	2%
Total PDB	5.596	100%	6.807	100%	(1.211)	-18%

Sektor minyak jatuh pada tahun 2013. Bahkan, volume yang disuling di sektor minyak yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2012.

Ekspor/Impor

Tabel di bawah ini merangkum perkembangan ekspor dan impor setiap sektor:

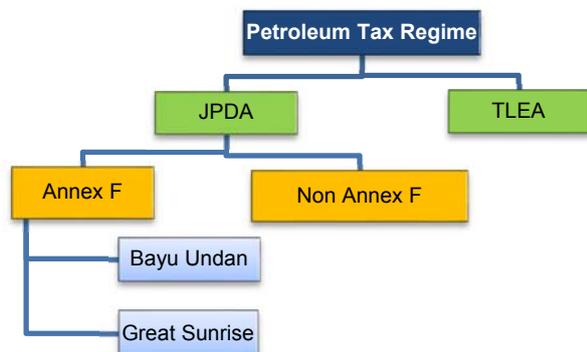
Data Ekspor / Impor	2013		2012		Beda	
	Juta USD	%	Juta USD	%	Juta USD	%
Oil sector Exports	5.217	98%	6.401	98%	(1.184)	-18%
Non-oil sector Exports	101	2%	125	2%	(24)	-19%
Total Exports of goods & services	5.318	100%	6.526	100%	(1.208)	-19%
Oil sector Imports	1.002	44%	951	37%	51	5%
Non-oil sector Imports	1.265	56%	1.592	63%	(327)	-21%
Total Imports of goods & services	2.266	100%	2.543	100%	(277)	-11%
Trade balance	3.051		3.983		(932)	-23%

Angka-angka diatas menunjukkan, ekspor dari sektor perminyakan adalah sebesar 98% dari ekspor barang.

¹ Sumber: Timor-Leste's National Accounts 2000-2013, Statistics and Analysis. Jumlah dalam harga saat ini.

4.1.5. Perpajakan

Sistem pajak minyak bumi tergantung dari daerah yurisdiksi seperti yang digambarkan dibawah ini¹:



Peraturan pajak minyak bumi diatur berdasarkan wilayah hukum di Timor-Leste, serta berdasarkan kawasan JPDA dan TLEA. Pajak yang dikumpulkan juga tergantung pada jenis kegiatan perminyakan yang dilakukan. Tabel dibawah ini menggambarkan peraturan pajak minyak bumi:

Kawasan dan Jenis Pajak	Tarif pajak dan kegiatan	Sumber Pendapatan	Dasar Hukum
A. JPDA annex F			
Wages Income Tax (resident employment)	10%. 15% and 30% on gross Income of the resident employee's salaries and wages or similar remuneration.	Bayu-Undan Great Sunrise project	UNTAET reg. no. 1999/1. Timor sea treat (TST). Taxation of Bayu-Undan Contractor Act (ToBuca) and Income Tax law with Circulars. and UNTAET Reg. No. 2000/18
Wages Income Tax (Non-resident employment)	20% on gross Income of the nonresident employee's salaries and wages or similar remuneration.		
Withholding Tax	Varies tax rate on gross Income of Goods and Services from a supplier company		
Value add Tax (VAT)	9% (90%x10%) on gross Income of goods and services from a supplier company		
Corporate Income Tax (CIT)	30% on taxable Income on annual Income from operators and their JV contractors.		
Additional Profit Tax (APT)	22.50% on ANR calculation with formula : $ANR \times 22.50\% / (1-r)$. and $ANR = ((A \times 116.50\%) - (I \times (1-r))) + B$ APT will applied against a contractor who has a positive amount of the ANR for the petroleum operations for a tax year is liable to pay APT for that year.		
B. JPDA non Annex F and TLEA			
B.1 : JPDA non Annex F			
Wages Income Tax (resident employment)	Up to US\$ 550 =10% Above US\$ 550 =30% on gross Income of the resident employee's salaries and wages or similar remuneration	JPDA excluding Annex F	UNTAET reg. no. 1999/1. TST. Taxation Duties Act with Decree law no. 8/2008. and Circular Letter (SE) of the Director General of Taxation (Dirgentax). and UNTAET Reg. No. 2000/18
Wages Income Tax (Non-resident employment)	20% on gross Income of the nonresident employee's salaries and wages or similar remuneration		
Withholding Tax	5.4% (90%x6%) on all services (Goods and Services)		
Value add Tax (VAT)	9% (90%x10%) on gross income of Goods and Services		
Corporate Income Tax (CIT)	30% on taxable Income of annual Income from operators and their JV contractors.		
Supplemental Petroleum Tax (SPT)	22.50% on ANR calculation with formula: $ANR \times 22.50\% / (1-r)$. and $ANR = ((A \times 116.50\%) - (I \times (1-r))) + B$. SPT will applied against a contractor who has a positive amount of the ANR for the petroleum operations for a tax year is liable to pay SPT for that year		

¹ Sumber: NDPMR.

Kawasan dan Jenis Pajak	Tarif pajak dan kegiatan	Sumber Pendapatan	Dasar Hukum
B.2. Timor-Leste Exclusive Area (TLEA)			
Wages Income Tax (resident employment)	Up to US\$ 550 =10% Above US\$ 550 =30% on gross Income of the resident employee's salaries and wages or similar remuneration		
Wages Income Tax (Non-resident employment)	20% on gross Income of the nonresident employee's salaries and wages or similar remuneration.	Petroleum activities on offshore or onshore in Timor-Leste sovereign area	UNTAET reg. no. 1999/1. TST.
Withholding Tax	6% on all services (Goods and Services)		Taxation Duties Act with Decree law no. 8/2008. and UNTAET Reg. No. 2000/18
Corporate Income Tax (CIT)	30% on taxable Income of annual Income from operators and their JV contractors.		
Supplemental Petroleum Tax (SPT)	22.50% on ANR calculation with formula: $ANR \times 22.50\% / (1-r)$. and $ANR = ((Ax116.50\%) - (x(1-r))) + B$ SPT will applied against a contractor who has a positive amount of the ANR for the petroleum operations for a tax year is liable to pay SPT for that year		

4.1.6. TIMOR GAP. E.P. (Badan Usaha Milik Negara)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang no 31/2011, TIMOR GAP menerima suntikan dana pemerintah dalam bentuk transfer publik tahunan untuk tujuan mendukung kegiatan operasionalnya sesuai dengan UU APBN. Transfer publik untuk TIMOR GAP dilakukan melalui anggaran tahunan Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral (MPRM). Dana yang dialokasikan untuk TIMOR GAP didasarkan pada rencana tahunan perusahaan yang disetujui oleh Dewan Menteri.

Kesepakatan tentang pelaksanaan anggaran dan pelaporan ditandatangani setiap tahun antara MPRM dan TIMOR GAP, sebelum pencairan dana ke rekening bank yang ditunjuk TIMOR GAP. Berdasarkan Pasal 4 UU no 31/2011, TIMOR GAP wajib menyampaikan laporan triwulanan untuk MPRM atas penggunaan dana masyarakat. Rincian dana yang ditransfer disebutkan di Laporan Tahunan TIMOR GAP 2013 (halaman 8).¹

TIMOR GAP tidak melakukan reinvestasi atau memberikan pinjaman kepada pihak ketiga selama tahun 2013.

TIMOR GAP diberi mandat untuk mengelola proyek Tasi Mane atas nama Pemerintah. Pengeluaran pada proyek-proyek Tasi Mane yang diambil dari anggaran tahunan TIMOR GAP ini sebagian besar digunakan untuk studi ekonomi dan lingkungan, biaya perjalanan serta biaya terkait dengan kegiatan kemasyarakatan, di mana kami percaya semua itu bukanlah pengeluaran yang semu. Karena itu, TIMOR GAP tidak memiliki pengeluaran semu yang terkait dengan kegiatan sosial yang dapat dilaporkan pada tahun 2013.

Pendapatan TIMOR GAP yang diterima pada tahun 2013 sudah termasuk dalam laporan keuangan 2013 yang telah diaudit dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan perusahaan (halaman 37). Tidak ada pendapatan yang diterima dari anak-anak perusahaan pada tahun 2013.

Anak-anak perusahaan TIMOR GAP:

PSC 11-106 Unipessoal. Lda dan GAP-MHS.

TIMOR GAP merupakan bagian dari Joint Venture (JV) dengan ENI dan Inpex untuk PSC 11-106 di daerah JPDA yang efektif mulai tanggal 23 Oktober 2013. TIMOR GAP memiliki 24% saham di kemitraan JV. Untuk rincian lebih lanjut, silahkan lihat Laporan Tahunan TIMOR GAP tahun 2013 (halaman 16). Sebagai mitra JV TIMOR GAP PSC 11-106 Unipessoal Ltd diatur oleh persyaratan kerahasiaan dalam PSC dan Perjanjian Joint Operating, dan dengan demikian tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut.

¹ Laporan Tahunan 2013 dapat di upload dari <http://timorgap.com/databases/website.nsf/vwAllNew2/Annual%20Reports>

GAP-MHS Aviation Lda

TIMOR GAP memiliki 60% saham dalam kemitraan ini dengan MHS Aviation (TL) Lda. Tidak ada pendapatan dari anak perusahaan ini yang telah dilaporkan pada tahun 2013 karena pendapatan yang diterima dalam bentuk dividen hanya dibayar pada tahun 2014. Untuk informasi lebih lanjut tentang anak perusahaan ini silakan lihat Laporan Tahunan TIMOR GAP Laporan tahun 2013 (halaman 24).

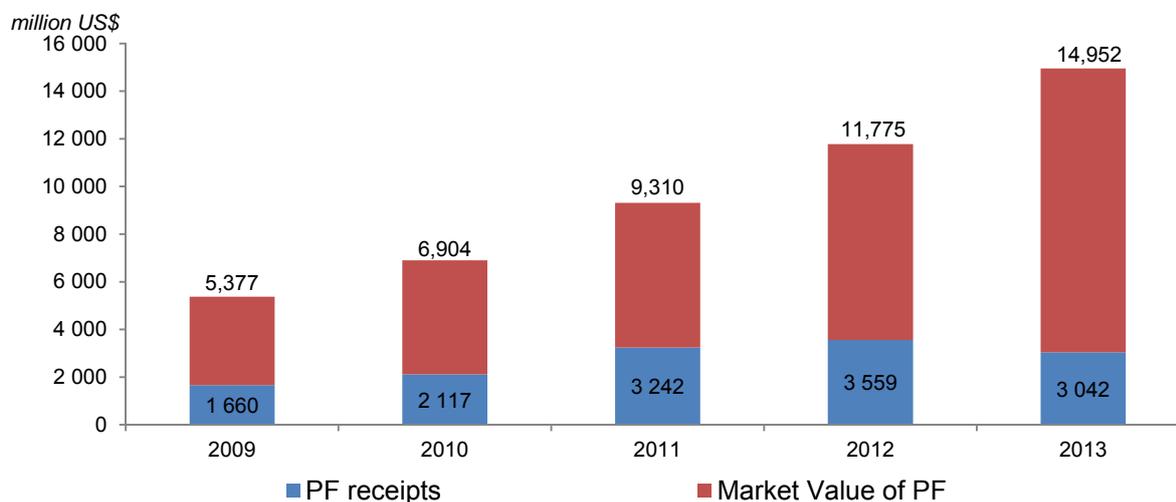
4.1.7. Distribusi pendapatan dari industri ekstraktif

Menurut Undang-Undang Minyak, jumlah pembayaran dari PF untuk satu tahun fiskal tidak akan melebihi jumlah yang dialokasikan dan telah disetujui oleh Parlemen untuk satu Tahun Anggaran. Perkiraan Penghasilan yang Berkelanjutan (ESI) untuk satu tahun fiskal adalah jumlah maksimum yang dapat dialokasikan dari PF pada tahun fiskal yang bersangkutan.

Selama tahun 2013, sebanyak USD 730 juta telah ditransfer ke anggaran negara. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan Nilai Pasar dari Dana Perminyakan selama lima tahun terakhir¹:

Periode	Jumlah dalam Juta USD				
	2009	2010	2011	2012	2013
Nilai pasar PF – awal periode	4.197	5.377	6.904	9.310	11.775
<i>Total Petroleum Fund diterima</i>	<i>1.660</i>	<i>2.117</i>	<i>3.242</i>	<i>3.559</i>	<i>3.042</i>
Transfer ke Anggaran Negara	(512)	(811)	(1.055)	(1.495)	(730)
Pengembalian Pajak	-	-	(2)	-	-
Hasil Investasi	31	221	221	401	865
Nilai pasar PF – akhir periode	5.377	6.904	9.310	11.775	14.952
<i>Perubahan dalam nilai</i>	<i>1.180</i>	<i>1.527</i>	<i>2.406</i>	<i>2.465</i>	<i>3.177</i>
<i>Perubahan dalam %</i>	<i>28%</i>	<i>28%</i>	<i>35%</i>	<i>26%</i>	<i>27%</i>

Diagram dibawah ini menggambarkan kenaikan nilai pasar dari PF selama lima tahun terakhir:



4.1.8. Kepemilikan Perusahaan

Sebagian besar Kontraktor di Kawasan JPDA dan Kawasan TLEA adalah anak perusahaan dari emiten perusahaan yang tergabung di Bursa Efek Australia. Selama tahun buku laporan EITI, tidak ada perubahan dalam kepemilikan dari masing-masing perusahaan.

¹ Sumber: Laporan Auditor Independen kepada Departemen Keuangan, sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan Dana Perminyakan tahun 2008-2012.

Kontraktor di kawasan JPDA dan TLEA	Tercatat di
Woodside Timor Sea Petroleum	Australia Stock Exchange/Bursa Efek Australia
Eni JPDA 06-105 / Eni JPDA 11-106 / Eni TLEA S06-03. S06-04	Milan Stock Exchange/Bursa Efek Milan
Oilex 06-103	Australia Stock Exchange/Bursa Efek Australia

4.2. Sektor Pertambangan

4.2.1. Latar belakang dan profile dari sektor pertambangan di RDTL

Sampai saat ini peranan sektor pertambangan di RDTL belum signifikan. Selama tahun 2013, delapan perusahaan pertambangan telah beroperasi dengan delapan lisensi, terutama untuk pertambangan Batu Kerikil dan Pasir, sebagai berikut:

N°	Perusahaan (DNM)	Unit	Jenis mineral	Jumlah ditambang / tahun	Bulan Pembayaran	Lokasi
1	Montana Diak Uniperssoal Lda	m3	Pasir	1.400	Januari	Hera. M. Dili
2	Montana Diak Uniperssoal Lda	m3	Kerikil	3.800	Januari	M. Liquiça
3	Weng Enterprise Group Co. Ltd	m3	Pasir	4.300	Januari	M. Liquiça
4	Suai Indah Construction	m3	Kerikil	2.592	Januari	M. Manatuto
5	Libama Consorcio	m3	Pasir	4.000	Junei	M. Liquiça
6	Yefa Unipessoal Lda	m3	Pasir	200	April	M. Dili
7	RMS Engineering & Construction Pty Lda	m3	Pasir	5.000	April	M. Dili
8	Empat Saudara Lda	m3	Kerikil	936	Juni	M. Oecusse

Total penerimaan dari perusahaan pertambangan diperkirakan sebesar USD 37.000 sebagaimana diuraikan pada Lampiran 7 laporan ini. Jumlah ini mewakili kurang dari 0,001% dari pendapatan yang diterima dari perusahaan Migas.

4.2.2. Faktor Hukum

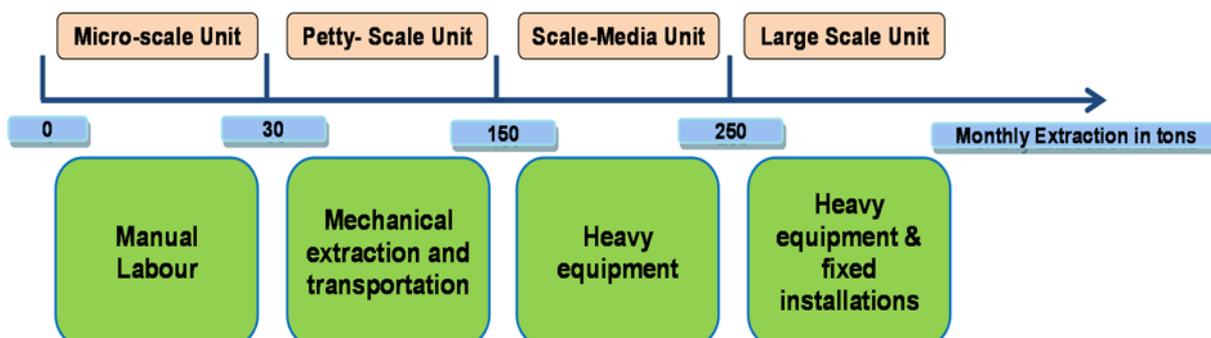
Sektor pertambangan diatur dengan Surat Keputusan Menteri N° 1/2008 tanggal 30 Juli 2008 yang memberikan aturan khusus tentang perizinan kegiatan ekstraktif (pertambangan dan penggalian) dari kelompok mineral.

Perijinan sektor pertambangan berlaku untuk satu tahun dan bisa diperpanjang tanpa persyaratan yang ketat pada kajian teknis dan keuangan dari pemegang lisensi. Lisensi pertambangan yang ada diberikan untuk kegiatan skala menengah, tidak ada proses pelelangan.

Berbagai jenis mineral sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pasal 4, disajikan pada tabel dibawah ini:

Mineral yang diambil untuk digunakan dalam konstruksi	Batu-batuan
Pasir – Grit – Sandstone – Andesine – Basalt – Diorite - Gabbro	Batu kapur - Marmer

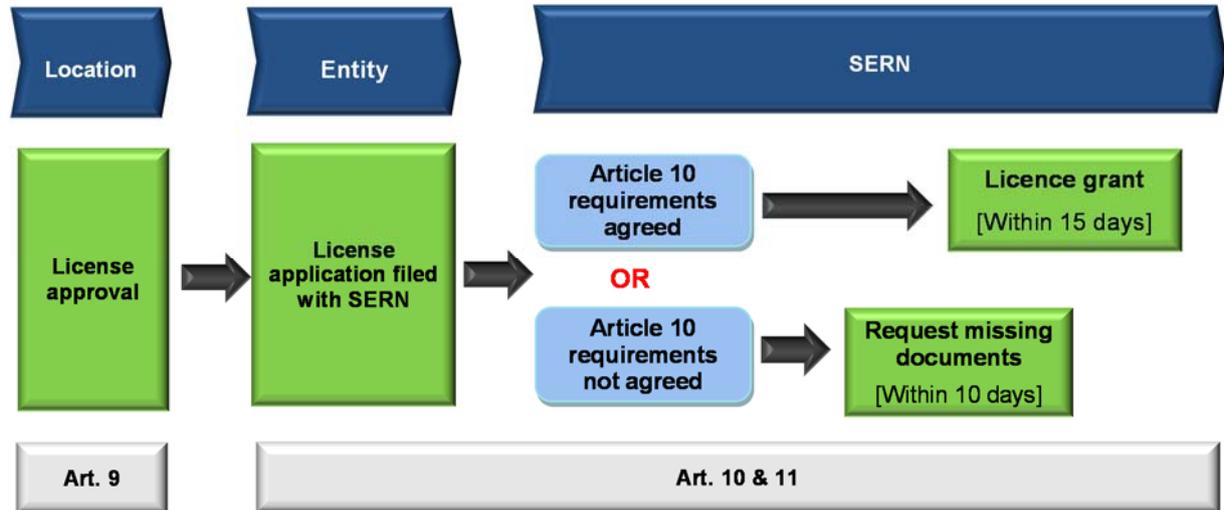
Diagram di bawah menunjukkan 4 (empat) kategori kegiatan pertambangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pasal 7:



4.2.3. Perijinan

Sektor pertambangan diatur dengan Surat Keputusan Menteri N° 1/2008 tanggal 30 Juli 2008, yang menetapkan proses perizinan yang berbeda-beda, tergantung pada ukuran unit pertambangan.

Gambar di bawah ini menjelaskan proses perizinan untuk Unit Menengah:



4.2.4. Perpajakan

Perusahaan pertambangan harus membayar dua jenis biaya sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah:

Referensi	Penerimaan	Unit Skala Menengah
Pasal 8	Biaya per tons dalam USD	Pasir dan Grit : 1.5 Batu Kapur : 2 Marmer: 10
Pasal 19	Biaya lisensi dalam USD	100 s/d 1.000

5. RUANG LINGKUP REKONSILIASI

Pekerjaan kami meliputi analisa awal mengenai proses pelaporan EITI untuk memastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan telah didefinisikan dengan jelas, termasuk Template Pelaporan, prosedur pengumpulan data, dan jadwal untuk penerbitan Laporan EITI. Kami juga berkonsultasi dengan Lembaga-lembaga Pemerintah dalam rangka mengumpulkan informasi yang relevan mengenai besarnya sektor ekstraktif di RDTL dan kontribusinya terhadap perekonomian dan pendapatan Negara.

Kami telah mempertimbangkan semua informasi yang kami terima selama kerja lapangan, termasuk komentar-komentar dan informasi yang kami terima dari MSG EITI RDTL.

5.1. Pemilihan Ruang Lingkup Rekonsiliasi

Ruang lingkup rekonsiliasi untuk laporan ini meliputi perusahaan-perusahaan ekstraktif dan Lembaga-lembaga Pemerintah yang dipilih dan ditentukan oleh MSG EITI RDTL. Selain itu, Template Pelaporan yang akan digunakan oleh entitas untuk melaporkan pembayaran juga disiapkan dan disetujui oleh MSG.

Ruang lingkup rekonsiliasi yang digunakan dalam menyusun laporan EITI RDTL tahun 2013 adalah sebagai berikut:

5.2. Perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam rekonsiliasi EITI

5.2.1. Sektor Migas

Perusahaan-perusahaan ekstraktif dan Lembaga-lembaga Pemerintah yang tercakup dalam rekonsiliasi EITI ditentukan berdasarkan TOR yang dikeluarkan pada bulan Juni 2014 (pasal 5). Dengan demikian, terdapat 20 (dua puluh) perusahaan ekstraktif dan 3 (tiga) Lembaga Pemerintah yang telah dipilih dalam pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2013.

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

1	AusAid ¹	11	Inpex Sahul Ltd
2	ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	12	Inpex Timor Sea Ltd
3	ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	13	Japan Energy Corporation
4	ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	14	Minza Oil and Gas Ltd
5	ConocoPhillips (03-19) Pty Ltd	15	Oilex Ltd
6	ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	16	Petronas ²
7	ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	17	Santos JPDA (91-12) Pty Ltd
8	Eni JPDA 03-13 Ltd	18	Talisman ReSumbers (JPDA 06-105) Pty Ltd
9	Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	19	Tokyo Timor Sea ReSumbers
10	Eni Timor Leste S.p.A.	20	Woodside Petroleum

5.2.2. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan di Timor-Leste hanya mencakup kegiatan skala menengah yang khusus menambang pasir dan kerikil. Perusahaan tambang membayar royalti dan biaya-biaya kepada Direktorat Nasional Mineral pada awal kontrak. Penerimaan pemerintah dari sektor pertambangan tidak material dibandingkan dengan total pendapatan dari sektor ekstraktif (0,001%). Akibatnya, perusahaan pertambangan tidak diikuti sertakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi.

¹ AusAid adalah organisasi non-pemerintah (NGO) yang membayar biaya pipa kilang minyak setiap tahunnya.

² Untuk Petronas, tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh NDPMR maupun NPA. Petronas telah digantikan oleh TIMOR GAP E.P.

5.3. Pajak dan pendapatan yang tercakup

Menurut informasi yang kami peroleh dari NPA, NDPMR dan CBTL, semua jenis pembayaran yang berhubungan dengan pajak Migas termasuk dalam ruang lingkup rekonsiliasi. Oleh karena itu, 16 (enam belas) jenis pembayaran telah dipilih untuk pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2013. Jenis pembayaran tersebut tercantum dalam tabel di bawah:

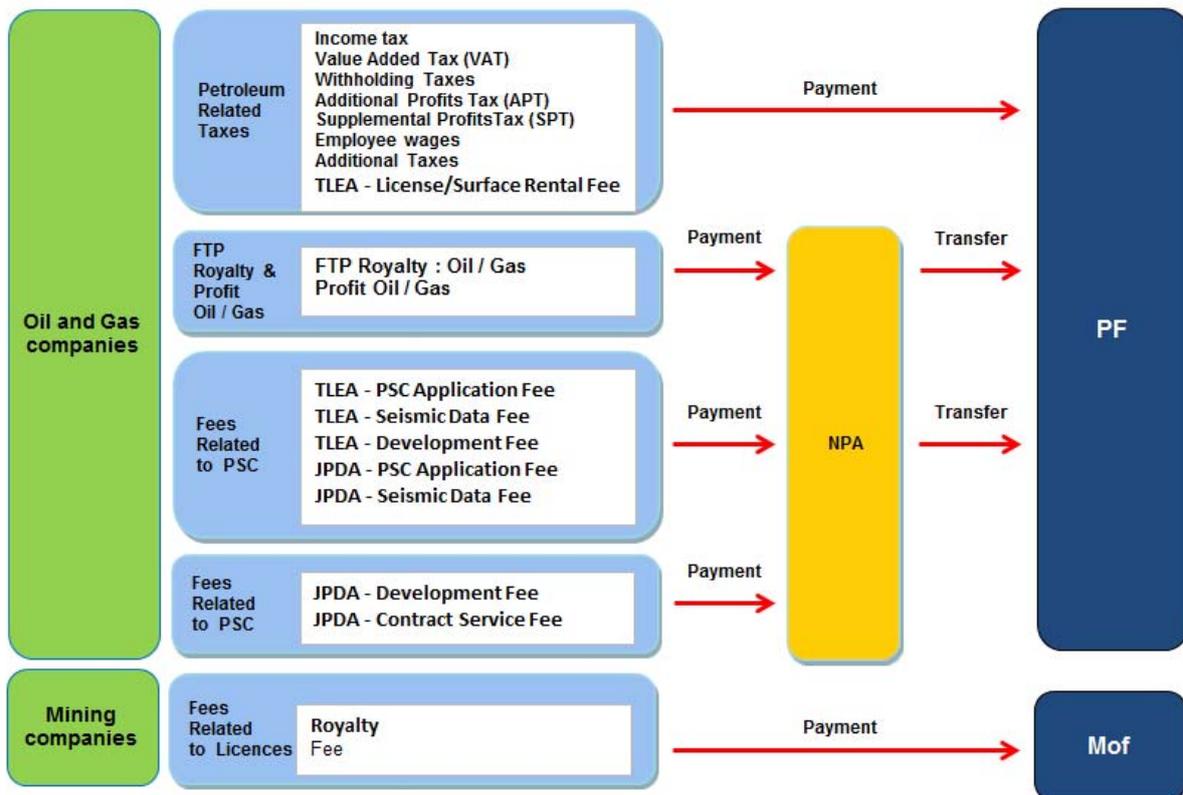
No.	Sumber Pendapatan	Keterangan
National Directorate Petroleum and Minerals Revenue (NDPMR)		
1	Pajak penghasilan	Pajak atas penghasilan kena pajak wajib pajak setiap tahun pajak. Penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto wajib pajak yang diperoleh oleh wajib pajak dalam tahun pajak dikurang pemotongan yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan yang berlaku atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bruto.
2	Pajak atas keuntungan tambahan	Pajak penghasilan tambahan yang harus dibayar oleh Kontraktor yang memiliki akumulasi penerimaan bersih positif yang berasal dari Proyek Bayu Undan untuk satu tahun pajak yang ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Kontraktor Bayu Undan (Timor-Leste tahun 2003).
3	Pajak atas keuntungan kantor cabang	Pajak yang berlaku untuk anak perusahaan asing sebesar 15% setelah pajak penghasilan. Pajak ini secara konseptual mirip dengan pajak dividen.
4	PPN	Pajak Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
5	Pajak dibayar dimuka	Ini adalah pajak di mana setiap orang atau perusahaan yang melakukan pembayaran tertentu harus memotong dari pembayaran tersebut dan melaporkannya ke kantor Dinas Pendapatan Timor-Leste (DPTL). Jenis pembayaran yang harus dipotong pajaknya adalah pembayaran untuk jasa manajemen dan konsultasi, komisi, dividen, sewa dan pembayaran kepada kontraktor bukan penduduk Timor-Leste.
6	Pajak karyawan	Pajak atas upah karyawan.
7	Tambahan Pajak	Penalti atau bunga atas keterlambatan pembayaran bagian Royalti dan Laba minyak/gas untuk Negara. Ketetapan pajak.
National Petroleum Authority (NPA)		
8	FTP - Gas	Penghasilan yang dibayar berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (PSC) antara Pemerintah RDTL dan Perusahaan yang berkaitan dengan transaksi penjualan Migas.
9	Pembayaran keuntungan Migas	Penghasilan yang dibayar berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (PSC) antara Pemerintah RDTL dan Perusahaan yang berkaitan dengan keuntungan dari penjualan Migas.
10	JPDA - PSC Application Fee	Biaya yang harus dibayar saat mengajukan aplikasi untuk PSC.
11	JPDA - Seismic Data Fee	Biaya yang harus dibayar kepada NPA ketika sebuah perusahaan memperoleh data seismik di Kawasan JPDA.
12	JPDA - Development Fee	Berlaku ketika kontraktor menyatakan adanya penemuan komersial. Biaya berdasarkan besarnya cadangan Migas yang ditemukan.
13	JPDA - Contract Service Fee	Biaya permukaan
14	TLEA - PSC Application Fee	Biaya yang harus dibayar ketika sebuah perusahaan mengajukan perijinan.
15	TLEA - Seismic Data Fee	Biaya dibayar kepada NPA ketika sebuah perusahaan memperoleh data seismik di Kawasan TLEA.
Central Bank of Timor-Leste (CBTL)		
16	TLEA - License Fee/Surface Fee	Biaya dikenakan sehubungan dengan Lisensi. Lisensi (<i>Licence</i>) adalah perjanjian antara Perusahaan ekstraktif dan Pemerintah mengenai kawasan geografis atau geologi yang spesifik dan kegiatan mineral di kawasan tersebut. Lisensi juga digunakan untuk menentukan jenis perijinan, posisi kawasan, kawasan kontrak, jenis kontrak atau batasan.

5.4. Lembaga Pemerintah

Berdasarkan daftar perusahaan ekstraktif yang diusulkan dan arus pembayaran, Lembaga-lembaga Pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan rekonsiliasi yang berakhir 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Lembaga yang berada di pusat	
1	National Directorate Petroleum and Minerals Revenue (NDPMR)
2	National Petroleum Authority (NPA)
3	Central Bank of Timor-Leste (CBTL)

5.5. Bagan arus pembayaran dari sektor ekstraktif



6. HASIL REKONSILIASI

Dibawah ini kami sajikan hasil rekonsiliasi beserta catatan perbedaan antara jumlah yang dibayar oleh perusahaan ekstraktif dengan jumlah yang diterima oleh Lembaga Pemerintah. Kami sajikan jumlah awal yang dilaporkan, penyesuaian yang dilakukan, serta jumlah akhir dan perbedaan yang tidak dapat dicocokkan.

6.1. Rekonsiliasi berdasarkan perusahaan ekstraktif

Tabel di bawah ini merangkum perbedaan antara pembayaran yang dilaporkan oleh perusahaan Migas dan pendapatan yang diterima oleh Lembaga Pemerintah.

No.	Perusahaan	Templates originally lodged			Penyesuaian			Nilai Akhir		
		Perusahaan	Pemerintah	Beda	Perusahaan	Pemerintah	Beda	Perusahaan	Pemerintah	Beda
		<i>Jumlah dalam USD</i>								
1	Eni Timor Leste S.p.A.	153.602	118.011	35.591	-	35.591	(35.591)	153.602	153.602	-
2	Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	143.173.989	143.115.443	58.546	-	58.836	(58.836)	143.173.989	143.174.279	(290)
3	Eni JPDA 03-13 Ltd	306.779.778	292.017.625	14.762.153	(14.761.045)	1.088	(14.762.133)	292.018.733	292.018.713	20
4	Woodside Petroleum	486.544	486.544	-	-	-	-	486.544	486.544	-
5	Inpex Sahul Ltd	308.159.493	308.156.190	3.303	-	3.303	(3.303)	308.159.493	308.159.493	-
6	Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	311.849.040	311.849.995	(955)	-	-	-	311.849.040	311.849.995	(955)
7	Talisman ReSumbers (JPDA 06-105) Pty Ltd	96.813.465	102.720.132	(5.906.667)	5.906.667	1.515	5.905.152	102.720.132	102.721.646	(1.514)
8	Oilex Ltd	116.545	116.545	-	-	-	-	116.545	116.545	-
9	Minza Oil and Gas Ltd	-	429.368	(429.368)	-	-	-	-	429.368	(429.368)
10	Tokyo Timor Sea ReSumbers	238.694.330	238.694.330	-	4.396	4.396	-	238.698.726	238.698.726	-
11	ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	953.872.232	953.846.411	25.821	(28.588)	-	(28.588)	953.843.645	953.846.411	(2.766)
12	ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	144.173.896	144.168.300	5.596	(5.596)	-	(5.596)	144.168.300	144.168.300	-
13	Conocophillips (Timor Sea) Pty Ltd	212.362.632	212.354.388	8.245	(8.245)	-	(8.245)	212.354.388	212.354.388	-
14	Conocophillips (Emet) Pty Ltd	25.042.836	25.041.863	972	(972)	-	(972)	25.041.863	25.041.863	-
15	Conocophillips JPDA Pty Ltd	412.082.198	412.066.210	15.988	(15.988)	-	(15.988)	412.066.210	412.066.210	-
16	ConocoPhillips (03-19) Pty Ltd	1.673	1.673	-	-	-	-	1.673	1.673	-
17	TIMOR GAP (11-106)	2.592	2.592	-	-	-	-	2.592	2.592	-
18	Japan Energy Corporation	-	30.158	(30.158)	-	-	-	-	30.158	(30.158)
19	Inpex Timor Sea Ltd	98.356.187	98.356.187	-	-	-	-	98.356.187	98.356.187	-
20	AusAid	8.287.200	8.287.200	-	-	-	-	8.287.200	8.287.200	-
	Total	3.260.408.233	3.251.859.164	8.549.069	(8.909.371)	104.729	(9.014.100)	3.251.498.861	3.251.963.893	(465.032)

6.2. Rekonsiliasi berdasarkan arus pendapatan

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah pembayaran yang dilaporkan oleh perusahaan Migas dan Lembaga Pemerintah:

Jumlah dalam USD

N°	Keterangan Pembayaran	Templates originally lodged			Penyesuaian			Nilai Akhir		
		Perusahaan	Pemerintah	Beda	Perusahaan	Pemerintah	Beda	Perusahaan	Pemerintah	Beda
	NDPMR	1.143.996.484	1.150.284.652	(6.288.168)	5.906.667	(600)	5.907.267	1.149.903.151	1.150.284.052	(380.901)
1	Income Tax	597.306.290	602.930.950	(5.624.661)	5.870.725	246.590	5.624.136	603.177.015	603.177.540	(525)
2	Value Added Tax (VAT)	17.400.822	17.607.462	(206.640)	-	-	-	17.400.822	17.607.462	(206.640)
3	Withholding Taxes	12.432.323	12.608.587	(176.264)	17.621	-	17.621	12.449.944	12.608.587	(158.643)
4	Additional Profit Tax (APT)	491.040.635	491.287.834	(247.199)	-	(246.590)	246.590	491.040.635	491.041.244	(609)
5	Other taxes (Employee wages)	8.622.413	8.655.278	(32.864)	18.321	(600)	18.921	8.640.735	8.654.678	(13.943)
6	Additional Taxes	17.194.000	17.194.540	(540)	-	-	-	17.194.000	17.194.540	(540)
	NPA	2.108.124.549	2.093.287.312	14.837.236	(14.816.038)	105.329	(14.921.367)	2.093.308.510	2.093.392.641	(84.131)
7	FTP Royalty Oil / Gas & Profit Oil / Gas	2.103.211.259	2.088.389.050	14.822.209	(14.816.038)	10.301	(14.826.340)	2.088.395.220	2.088.399.351	(4.131)
8	JPDA - Seismic Data Fee	80.000	-	80.000	(80.000)	-	(80.000)	-	-	-
9	JPDA - Development Fee	3.901.950	3.983.200	(81.250)	-	(81.250)	81.250	3.901.950	3.901.950	-
10	JPDA - Contract Service Fee	640.000	880.000	(240.000)	240.000	80.000	160.000	880.000	960.000	(80.000)
11	TLEA - PSC Application Fee	160.000	-	160.000	(160.000)	-	(160.000)	-	-	-
12	TLEA - License / Surface Rental Fee	131.340	35.063	96.278	-	96.278	(96.278)	131.340	131.340	-
	CBTL	8.287.200	8.287.200	-	-	-	-	8.287.200	8.287.200	-
13	Pipeline fee (AusAid)	8.287.200	8.287.200	-	-	-	-	8.287.200	8.287.200	-
	Jumlah Pokok Pembayaran	3.260.408.233	3.251.859.164	8.549.069	(8.909.371)	104.729	(9.014.100)	3.251.498.861	3.251.963.893	(465.032)

6.3. Penyesuaian

6.3.1. Penyesuaian untuk perusahaan Migas

Penyesuaian dilakukan berdasarkan konfirmasi yang diterima dari Perusahaan Migas dan Lembaga Pemerintah serta didukung oleh bukti-bukti yang memadai dan dianggap tepat. Rincian penyesuaian adalah sebagai berikut:

<i>Jumlah dalam USD</i>	
Penyesuaian atas pembayaran dari Perusahaan Ekstraktif	Jumlah
Pajak dibayar tapi tidak dilaporkan (a)	5.911.063
Jumlah pajak yang dilaporkan tidak benar (b)	(14.820.434)
Penambahan/pengurangan atas jumlah awal yang dilaporkan	(8.909.371)

Rincian dari penyesuaian untuk setiap perusahaan adalah sebagai berikut:

<i>Jumlah dalam USD</i>			
Perusahaan	Pajak telah dibayar tidak dilaporkan (a)	Jumlah pajak dilaporkan tidak benar (b)	Jumlah
Talisman ReSumbers (JPDA 06-105) Pty Ltd	5.906.667	-	5.906.667
Tokyo Timor Sea ReSumbers	4.396	-	4.396
Eni JPDA 03-13 Ltd	-	(14.761.045)	(14.761.045)
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	-	(28.588)	(28.588)
ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	-	(5.596)	(5.596)
Conocophillips (Timor Sea) Pty Ltd	-	(8.245)	(8.245)
Conocophillips (Emet) Pty Ltd	-	(972)	(972)
Conocophillips JPDA Pty Ltd	-	(15.988)	(15.988)
Total Penyesuaian	5.911.063	(14.820.434)	(8.909.371)

Rincian dari penyesuaian berdasarkan sumber pendapatan adalah sebagai berikut:

<i>Jumlah dalam USD</i>				
Sumber Pendapatan	Pajak telah dibayar tidak dilaporkan (a)	Jumlah pajak dilaporkan tidak benar (b)	Klasifikasi pajak tidak benar (c)	Jumlah
NDPMR	5.906.667	-	-	5.906.667
Income Tax	5.906.667	-	(35.942)	5.870.725
Withholding Taxes	-	-	17.621	17.621
Other taxes (Employee wages)	-	-	18.321	18.321
NPA	4.396	(14.820.434)	-	(14.816.038)
FTP Royalty Oil / Gas & Profit Oil / Gas	4.396	(14.820.434)	-	(14.816.038)
JPDA - Seismic Data Fee	-	-	(80.000)	(80.000)
JPDA - Contract Service Fee	-	-	240.000	240.000
TLEA - PSC Application Fee	-	-	(160.000)	(160.000)
Total Penyesuaian	5.911.063	(14.820.434)	-	(8.909.371)

(a) Pajak dibayar tidak dilaporkan

Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Migas tetapi tidak dicantumkan dalam Template Pelaporan mereka. Setelah menerima dan memeriksa rincian pembayaran yang dikirim oleh perusahaan Migas, kami mencatat bahwa jumlah awal yang dicantumkan dalam template pelaporan tidak benar. Tabel di bawah ini menyajikan dua penyesuaian yang telah kami lakukan:

<i>Jumlah dalam USD</i>			
Perusahaan	Sumber Pendapatan	Jumlah	Keterangan
Talisman ReSumbers (06-105) Pty Ltd	Income Tax	5.906.667	Cicilan bulan Desember 2012 yang tidak dilaporkan.
Tokyo Timor Sea ReSumbers	FTP Royalty Oil / Gas & Profit Oil / Gas	4.396	Pembayaran bunga yang tidak dilaporkan
Total		5.911.063	

(b) Jumlah pajak yang dilaporkan tidak benar

Jumlah tersebut dilaporkan dengan tidak benar. Perbedaan sebesar USD 14.761.045 merupakan keuntungan minyak/gas yang dilaporkan dua kali oleh Eni JPDA 03-13 Ltd.

(c) Klasifikasi pajak tidak benar

Jumlah tersebut diklasifikasikan dengan tidak benar dalam template. Tabel di bawah ini merangkum penyesuaian yang dilakukan:

Perusahaan	Jumlah dalam USD						
	JPDA - Contract Service Fee	TLEA - PSC Application Fee	JPDA - Seismic Data Fee	Withholding Taxes	Other taxes (Employee wages)	Income Tax	Total
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	160.000	(160.000)	-	-	-	-	-
Oillex Ltd	80.000	-	(80.000)	(18.321)	18.321	-	-
Tokyo Timor Sea ReSumbers	-	-	-	35.942	-	(35.942)	-
Total	240.000	(160.000)	(80.000)	17.621	18.321	(35.942)	-

6.3.2. Penyesuaian untuk Lembaga Pemerintah

Penyesuaian dilakukan berdasarkan konfirmasi yang diterima dari perusahaan Migas atau Lembaga Pemerintah. Rincian dari penyesuaian ini adalah sebagai berikut:

Jumlah dalam USD	
Penyesuaian terhadap pembayaran pemerintah	Total
Pajak diterima tidak dilaporkan (a)	186.579
Pajak diterima dilaporkan diluar periode pelaporan (b)	(81.250)
Jumlah pajak yang dilaporkan tidak benar	(600)
Jumlah yang ditambahkan/dikurangkan ke jumlah awal dilaporkan	104.729

Rincian penyesuaian setiap perusahaan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Perusahaan	Jumlah dalam USD			
	Pajak diterima tidak dilaporkan (a)	Pajak diterima dilaporkan diluar periode pelaporan (b)	Jumlah pajak yang dilaporkan tidak benar	Total
Eni Timor Leste S.p.A.	96.278	-	(60.686)	35.591
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	80.000	(81.250)	60.086	58.836
Eni JPDA 03-13 Ltd	1.088	-	-	1.088
Inpex Sahul Ltd	3.303	-	-	3.303
Talisman ReSumbers (06-105) Pty Ltd	1.515	-	-	1.515
Tokyo Timor Sea ReSumbers	4.396	-	-	4.396
Total	186.579	(81.250)	(600)	104.729

Rincian penyesuaian berdasarkan pembayaran disajikan pada tabel dibawah ini:

Sumber Pendapatan	Jumlah dalam USD				
	Pajak diterima tidak dilaporkan (a)	Pajak diterima dilaporkan diluar periode pelaporan (b)	Jumlah pajak yang dilaporkan tidak benar	Klasifikasi pajak tidak benar	Total
NDPMR	-	-	(600)	-	(600)
Income Tax	-	-	-	246.590	246.590
Additional Profit Tax (APT)	-	-	-	(246.590)	(246.590)
Other taxes (Employee wages)	-	-	(600)	-	(600)
National Petroleum Authority (NPA)	186.579	(81.250)	-	-	105.329
FTP Royalty Oil / Gas & Profit Oil / Gas	10.301	-	-	-	10.301
JPDA - Development Fee	-	(81.250)	-	-	(81.250)
JPDA - Contract Service Fee	80.000	-	-	-	80.000
TLEA - License / Surface Rental Fee	96.278	-	-	-	96.278
Total	186.579	(81.250)	(600)	-	104.729

Pajak diterima tapi tidak dilaporkan

Karena adanya perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan yang diterima dari perusahaan Migas tetapi tidak dicantumkan dalam Template Pelaporan NPA. Tabel di bawah ini menyajikan penyesuaian yang dilakukan:

Perusahaan	Sumber Pendapatan	Jumlah dalam USD	
		Jumlah	Keterangan
Eni Timor Leste S.p.A.	TLEA - License / Surface Rental Fee	96.278	Omission
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	JPDA - Contract Service Fee	80.000	Omission
Tokyo Timor Sea ReSumbers	FTP Royalty Oil / Gas & Profit Oil / Gas	4.396	Profit oil interests
Inpex Sahul Ltd	FTP Royalty Oil / Gas & Profit Oil / Gas	3.303	Profit oil interests
Talisman ReSumbers (06-105) Pty Ltd	FTP Royalty Oil / Gas & Profit Oil / Gas	1.515	Profit oil interests
Eni JPDA 03-13 Ltd	FTP Royalty Oil / Gas & Profit Oil / Gas	1.088	Profit oil interests
Total		186.579	

(a) Pajak diterima dilaporkan tetapi diluar periode pelaporan

Jumlah ini berkaitan dengan *JPDA – Development fee* yang dibayar oleh Eni JPDA 06-105 Pty Ltd pada tanggal 8 Januari 2014 karenanya harus dikeluarkan dari rekonsiliasi tahun 2013.

6.4. Perbedaan yang tidak dapat dicocokkan

Setelah kami melakukan penyesuaian, terdapat perbedaan pembayaran yang tidak dapat dicocokkan sebesar **USD (465.032)** yang merupakan **0,014%** dari total pembayaran yang dilaporkan oleh Lembaga-lembaga Pemerintah.

Jumlah ini merupakan perbedaan positif sebesar **USD 19** dan perbedaan negatif sebesar **USD (465.051)**. Analisa atas perbedaan yang tidak dapat dicocokkan tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah dalam USD	
	Total
Template Pelaporan tidak diserahkan oleh Perusahaan Ekstraktif (a)	(459.526)
Perbedaan yang tidak material < USD 10.000	(5.506)
Total Perbedaan	(465.032)

(a) Template Pelaporan tidak diserahkan oleh perusahaan ekstraktif

Perbedaan yang tidak dapat dicocokkan ini berkaitan dengan 2 perusahaan yang tidak mengirimkan template pelaporan mereka meskipun telah diperingati beberapa kali. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah dalam USD	
	Total
Minza Oil and Gas Ltd	429.368
Japan Energy Corporation	30.158
Total	459.526

7. DATA YANG DILAPORKAN

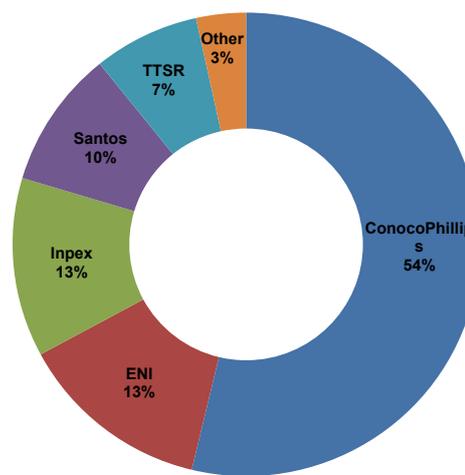
7.1. Analisa Pendapatan Pemerintah

7.1.1. Analisa pembayaran berdasarkan kontribusi perusahaan

Analisis pendapatan Pemerintah dari kontribusi perusahaan menunjukkan bahwa 5 perusahaan besar memberikan kontribusi sekitar 97% dari total pendapatan Pemerintah selama tahun 2013 dan ConocoPhillips menyumbang hampir 54% dari total pendapatan pemerintah dari sektor Migas untuk periode yang sama.

Tabel dan diagram dibawah ini menyajikan pendapatan dari 5 perusahaan terbesar pada tahun 2013:

Perusahaan	Pendapatan Pemerintah USD	% dari seluruh pendapatan
ConocoPhillips (6 entities)	1.747.478.845	54%
ENI (3 entities)	435.346.594	13%
Inpex (2 entities)	406.515.680	13%
Santos	311.849.995	10%
Tokyo Timor Sea ReSumbers	238.698.726	7%
Other companies (7 companies)	112.074.053	3%
Total Sektor Migas	3.251.963.893	100%

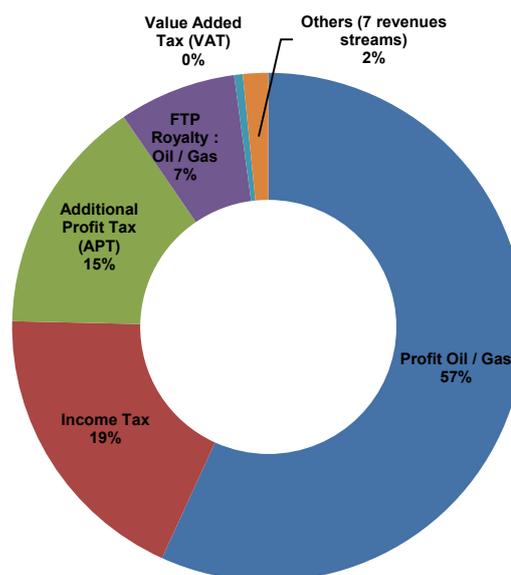


7.1.2. Analisa pembayaran berdasarkan aliran kontribusi

Analisis pembayaran berdasarkan besarnya kontribusi menunjukkan bahwa 5 jenis Pajak memberikan kontribusi sebesar 98% dari total pendapatan Pemerintah dari sektor Migas. Kami juga mencatat bahwa Keuntungan dari sektor Migas menyumbang hampir separuh dari total pendapatan pemerintah.

Tabel dan diagram di bawah ini menyajikan 5 sumber Pendapatan terbesar selama tahun 2013:

Sumber Pendapatan	Pendapatan Pemerintah USD	% dari seluruh pendapatan
Profit Oil / Gas	1.847.432.543	57%
Income Tax	603.177.540	19%
Additional Profit Tax (APT)	491.041.244	15%
FTP Royalty : Oil / Gas	240.966.808	7%
Value Added Tax (VAT)	17.607.462	1%
Others (7 revenue streams)	51.738.295	2%
Total Oil & Gas sector	3.251.963.893	100%



7.2. Tanggung jawab sosial perusahaan

Perusahaan-perusahaan diminta untuk melaporkan biaya untuk kegiatan sosial yang dilakukan selama tahun 2013. Pada tabel dibawah ini kami sajikan jumlah yang dilaporkan oleh Perusahaan Migas dalam template pelaporan mereka:

Komponen Lokal – Biaya yang dapat diperoleh kembali:

Perusahaan	Jumlah dalam USD
Eni Timor Leste S.p.A.	89.497
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	1.029.891
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	11.334.000
Total	12.453.388

Corporate Initiative (CSR) – Biaya yang tidak dapat diperoleh kembali:

Perusahaan	Jumlah dalam USD
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	1.066.000
Total	1.066.000

Komponen lokal dapat berupa pekerjaan dan penyediaan barang dan jasa, di mana dalam konteks TL, pengeluaran yang berkaitan dengan komponen lokal dapat diganti.

CSR bukan pembayaran sosial wajib dalam konteks TL, maka CSR bersifat sukarela. Oleh karena itu CSR bukanlah pengeluaran yang dapat diganti kecuali ada persetujuan dari Pemerintah.

8. SARAN

Rekomendasi dari Laporan tahun-tahun sebelumnya tidak dilaksanakan. Pada bagian dibawah ini kami sajikan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan proses EITI di RDTL.

Tindak lanjut Laporan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada bab 8.2 dibawah ini.

8.1. Pelajaran dari rekonsiliasi tahun 2012 / 2013

8.1.1. Tidak adanya Undang-undang EITI

Kami mencatat bahwa meskipun laporan EITI RDTL telah direkonsiliasi selama 4 tahun, belum ada kerangka hukum yang mendefinisikan peran dan tanggung pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses EITI.

Kami sarankan agar dibuat Undang-undang EITI sesegera mungkin. Undang-undang ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses EITI untuk semua pihak yang berkepentingan dan untuk memastikan bahwa proses rekonsiliasi telah dilakukan dengan sukses.

8.1.2. Keterbatasan Template Pelaporan

Template Pelaporan yang digunakan untuk pengumpulan data disiapkan dan disetujui oleh MSG. Meskipun kerangka acuan kami menyatakan bahwa Independen Administrator harus memberikan saran kepada MSG mengenai template pelaporan, kami diberitahu untuk tidak membuat perubahan pada format yang telah ditetapkan. Template Pelaporan memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- hanya menyajikan angka-angka tahunan dalam laporan entitas. Tidak ada tabel yang dilampirkan untuk melaporkan rincian dari jumlah yang dilaporkan: berdasarkan tanggal dan jenis pembayaran. Rincian pembayaran merupakan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Pelaksanaan rekonsiliasi akan menjadi lebih efisien dan akan banyak menghemat waktu jika semua entitas yang harus melapor diminta untuk mengirimkan rincian pembayaran mereka bersamaan dengan template pelaporan mereka;
- banyak informasi yang dicantumkan dalam Standar EITI tidak diminta dalam Template Pelaporan untuk perusahaan ekstraktif, seperti: ekspor, kepemilikan, audit atas laporan keuangan dan statistik ketenagakerjaan.

MSG harus meningkatkan format Template Pelaporan di masa depan untuk membuat proses pelaporan lebih efisien berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pelaksana Rekonsiliasi Independen. Template Pelaporan harus lebih komprehensif dan terperinci untuk mencakup semua persyaratan yang dicantumkan dalam standar EITI.

8.2. Tindak lanjut atas rekomendasi dari Laporan EITI sebelumnya

N°	Permasalahannya	Rincian Permasalahan	Saran	Status pelaksanaan laporan EITI RDTL tahun 2013 (Ya/tidak/dalam proses)
1	Database RDTL-EITI	Tampaknya sampai saat ini. Sekretariat TL-EITI tidak memiliki database yang komprehensif dari semua kegiatan perusahaan ekstraktif di sektor minyak. Kami memahami bahwa situasi ini muncul karena tidak ada komunikasi formal antara Sekretariat EITI dan lembaga pemerintah berkaitan dengan kegiatan perusahaan minyak di sektor minyak. Dalam beberapa kasus, melakukan kontak dengan perusahaan ekstraktif menjadi sulit karena tidak ada rincian kontak yang tersedia.	Kami sarankan agar Sekretariat TL-EITI membuat database perusahaan ekstraktif seperti pekerjaan rekonsiliasi yang kami lakukan. Sekretariat harus bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk memastikan memperoleh informasi yang memadai secara teratur dan meng-update database-nya. Untuk tujuan ini, kami percaya sangat penting bagi setiap pendatang baru pada sektor minyak terdaftar pada Sekretariat TL-EITI sebagai bagian dari proses sebelum atau pada saat yang sama ketika mereka mendapatkan lisensi operasional mereka. Dianjurkan agar lembaga pemerintah melakukan tinjauan atas daftar Perusahaan Minyak yang memiliki lisensi untuk beroperasi di sektor ini.	Tidak
2	Ruang lingkup rekonsiliasi – studi kelayakan	Kami mencatat bahwa ada satu perusahaan minyak yang beroperasi di Timor-Leste dan satu LSM Internasional yang tidak termasuk dalam ruang lingkup rekonsiliasi, yaitu Jepang Energi dan AusAid. Selanjutnya kami mencatat bahwa ada beberapa biaya yang dibayarkan kepada BCTL, seperti biaya tahunan dan biaya pipa eksplorasi tidak termasuk dalam template pelaporan yang dibuat dan telah disetujui oleh MSWG. Di sisi lain ada beberapa aliran pendapatan termasuk dalam template pelaporan tapi tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan minyak. Situasi ini menyebabkan penundaan dalam mengumpulkan data dari perusahaan minyak dan Lembaga Pemerintah serta dalam penyusunan laporan.	Kami sarankan untuk tahun-tahun mendatang bahwa studi kelayakan harus dilakukan sebelum setiap penugasan untuk menentukan ruang lingkup rekonsiliasi termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang harus dipertimbangkan (minyak, gas, mineral, dll.); • jenis penerimaan yang harus direkonsiliasi; • perusahaan ekstraktif yang akan melaporkan. dan • lembaga pemerintah yang termasuk dalam proses. Studi kelayakan juga akan mengarah pada definisi dan desain template pelaporan yang akan digunakan untuk deklarasi pembayaran dan penerimaan oleh perusahaan minyak dan Lembaga Pemerintah.	Tidak

LAMPIRAN

Lampiran 1: Rincian perusahaan Migas utama serta pendapatannya

Pada tabel dibawah ini kami sajikan perusahaan-perusahaan Migas terbesar di RDTL selama tahun 2013:

No.	Perusahaan	Tanggal berdiri	Kegiatan	Kebangsaan
1	ConocoPhillips	1917	Migas	USA
2	Eni	1926	Migas	Italia
3	Santos	1954	Migas	Australia
4	Inpex	1986	Migas	Australia

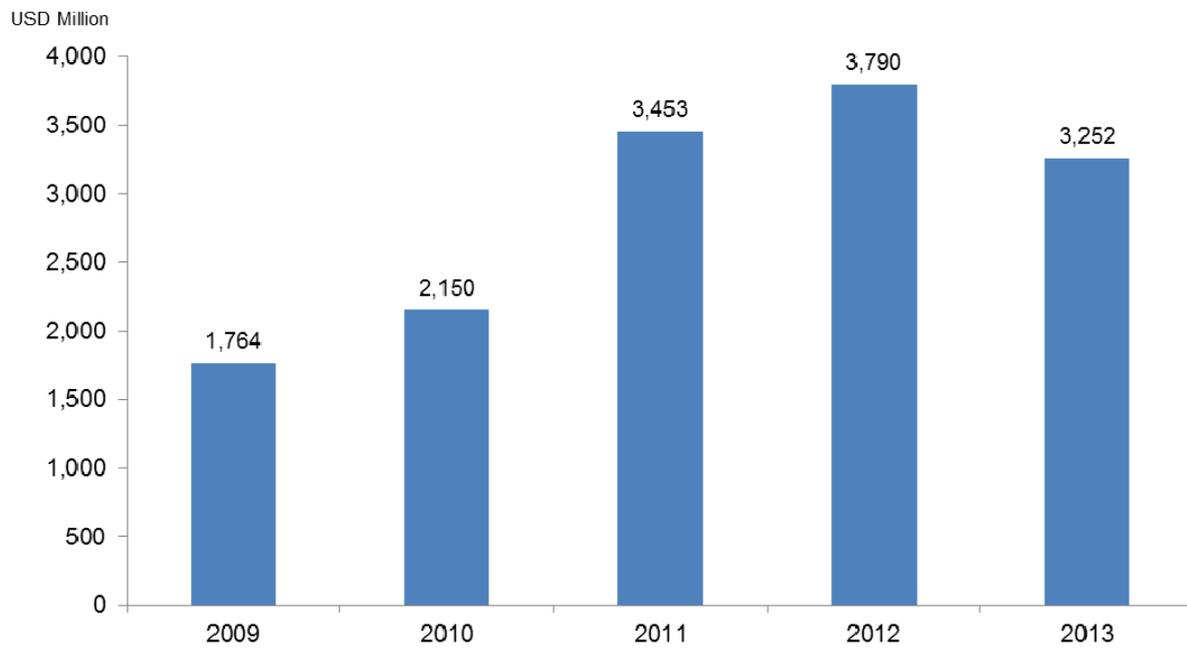
Pendapatan yang dibayar oleh perusahaan ke RDTL tahun 2012 / 2013

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan pendapatan Migas setiap perusahaan selama tahun 2012 & 2013:

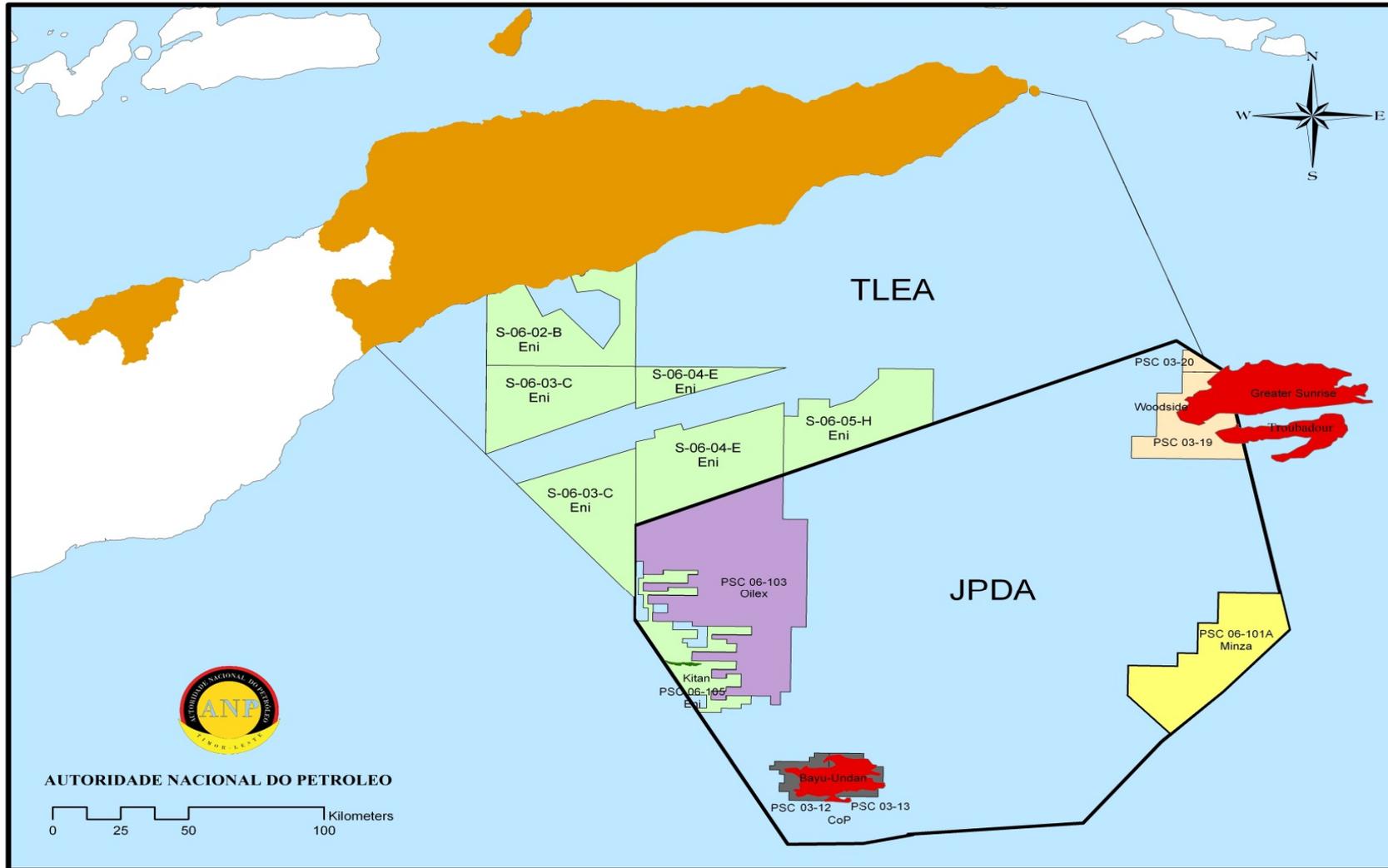
Perusahaan	2013	2012	Beda	
	Juta USD	Juta USD	Juta USD	%
ConocoPhillips (6 entities)	1.747	2.006	(259)	-13%
ENI (3 entities)	435	528	(93)	-18%
Inpex (2 entities)	407	492	(86)	-17%
Santos	312	330	(18)	-5%
Tokyo Timor Sea ReSumbers	239	279	(41)	-15%
Talisman ReSumbers	103	119	(16)	-14%
Other companies (6 companies)	9	35	(25)	-73%
Total	3.252	3.790	(538)	-14%

Lampiran 2: Perkembangan pendapatan Migas tahun 2009-2013

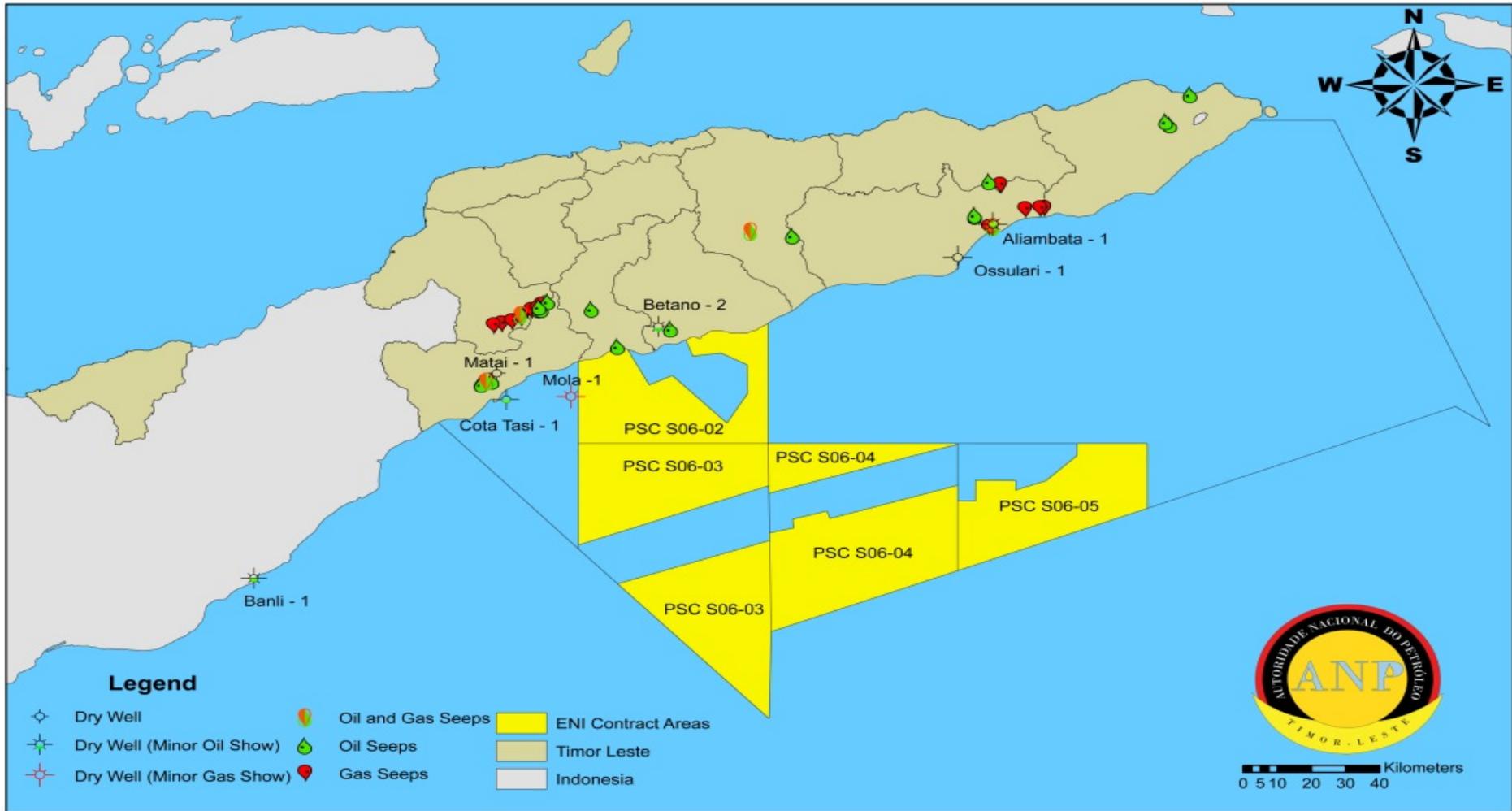
Diagram dibawah ini merangkum perkembangan pendapatan Migas tahun 2009-2013:



Lampiran 3: Lokasi kontrak di Kawasan TLEA dan JPDA



Lampiran 4: Daerah Resapan MIGAS di RDTL



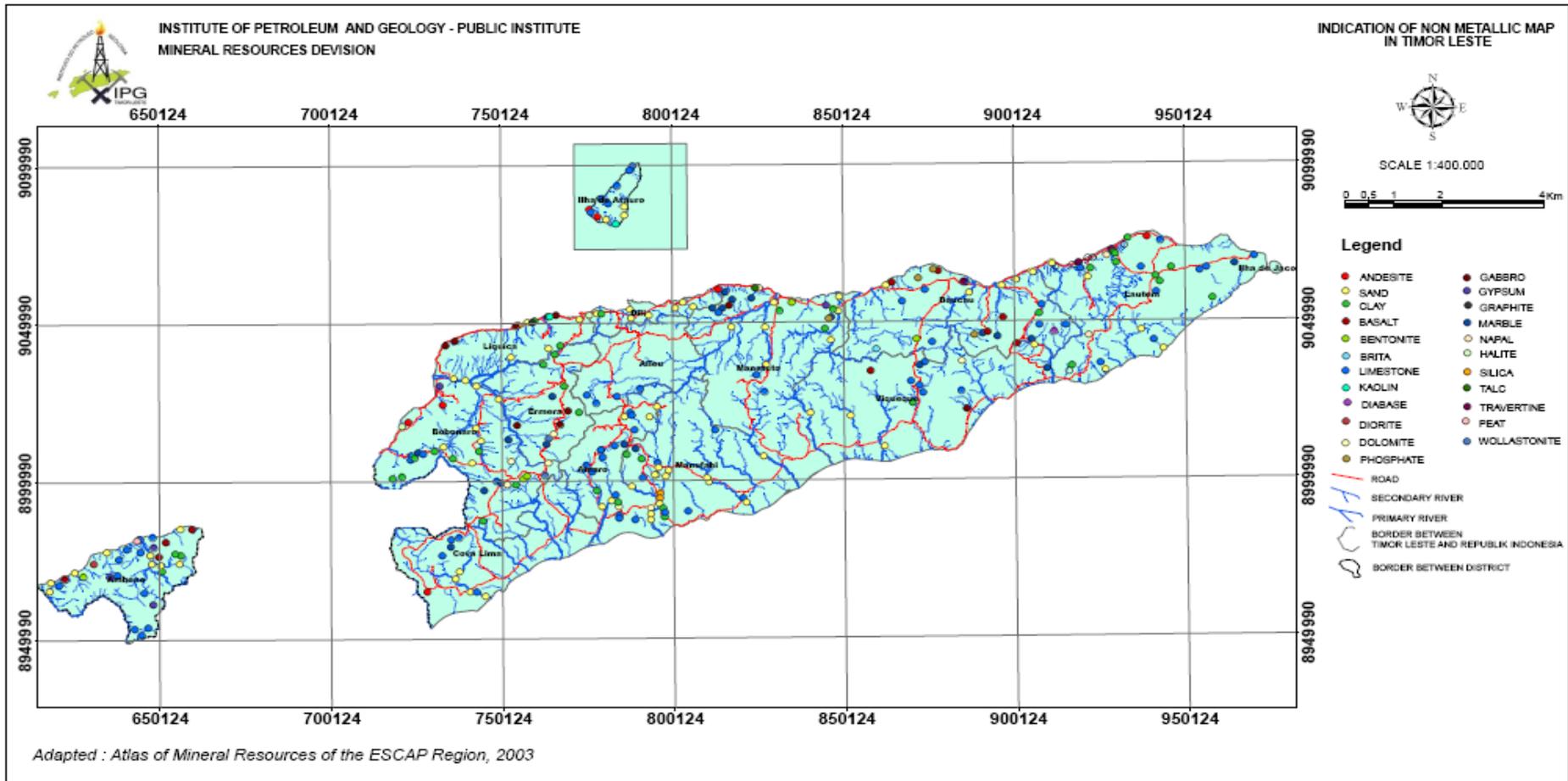
Lampiran 5: Profile perusahaan-perusahaan ekstraktif**Lisensi *Petroleum Exploitation* yang aktif selama tahun 2013**

No.	Nama Perusahaan	Nama Area Proyek	Nomor Lisensi	Tanggal Terbit Lisensi	Tanggal JatuhTempo	Jangka waktu dalam tahun	Luas permukaan dalam km ²	Jenis mineral yang digali
1	ENI JPDA 06-105 Pty Ltd (Operator) Inpex Talisman	JPDA	JPDA 06-105	22/09/2006	Tidak disebutkan	-	83	Minyak mentah
2	ConocoPhillips (Operator) Santos Inpex Sahul	JPDA	JPDA 03-12	02/04/2003	06/02/2022	19	316	Condensate. LPG. LNG
3	ConocoPhillips (Operator) Eni Tokyo Timor Sea ReSumbers	JPDA	JPDA 03-13	02/04/2003	16/12/2021	19	330	Condensate. LPG. LNG
4	Woodside Petroleum (Operator) Shell Development Osaka Gas Sunrise ConocoPhillips	JPDA	JPDA 03-19	02/04/2003	03/10/2026	24	1.092	Gas
5	Woodside Petroleum (Operator) Shell Development Osaka Gas Sunrise ConocoPhillips	JPDA	JPDA 03-20	02/04/2003	15/11/2026	24	90	Gas

Lisensi eksplorasi perminyakan yang aktif selama tahun 2013

No.	Nama Perusahaan	Nama Area Proyek	Nomor Lisensi	Tanggal Terbit Lisensi	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka waktu dalam tahun	Luas permukaan dalam km ²
1	ENI JPDA 11-106 BV (Operator) INPEX Offshore Timor-Leste Ltd TIMOR GAP PSC 11-106 Unipessoal Limitada	JPDA	JPDA 11-106	23/10/2013	23/10/2016	3	662
2	Minza Limited	JPDA	JPDA 06-101 A	09/03/2007	09/03/2014	7	1.082
3	Oilex Ltd (Operator) Japan Energy Corporation Videocon Bharat Petro ReSumbers GSPC Pan Pacific Petroleum	JPDA	JPDA 06-103	15/01/2007	15/01/2014	7	1.971
4	ENI Timor Leste SPA (Operator) GALP Exploracao Producao Petrolifera Korea Gas Corporation	TLEA	S-06-02 (Block B)	03/11/2006	03/11/2013	7	1.530
5	ENI Timor Leste SPA (Operator) GALP Exploracao Producao Petrolifera Korea Gas Corporation	TLEA	S-06-03 (Block C)	03/11/2006	03/11/2013	7	2.841
6	ENI Timor Leste SPA (Operator) GALP Exploracao Producao Petrolifera Korea Gas Corporation	TLEA	S-06-04 (Block E)	03/11/2006	03/11/2013	7	2.314
7	ENI Timor Leste SPA (Operator) GALP Exploracao Producao Petrolifera Korea Gas Corporation	TLEA	S-06-05 (Block H)	03/11/2006	03/11/2013	7	1.422

Lampiran 6: Sumber-sumber mineral di RDTL



Lampiran 7: Pihak-pihak yang dihubungi atau terlibat dalam pelaksanaan rekonsiliasi EITI RDTL tahun 2013

Pelaksana rekonsiliasi – Moore Stephens LLP		
Tim Woodward	Partner	
Ben Toorabally	Head of Office / Mission Director	
Radhouane Bouzaiane	Senior Manager / Team Leader	
Hedi Zaghouani	Audit Senior	
Rita Freitas	Audit Assistant	
Sekretariat EITI RDTL		
Elda Guterres da Silva	National Coordinator	
Trifonio Flor Sarmiento	Outreach Officer	
Ana Paula de Araujo	Programme Officer	
Sonia do Rosario Boavida	Administration Officer	
Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral/Ministry Petroleum and Mineral Resources (MPMR)		
Alfredo Pires	Minister of Petroleum and Mineral Resources	
Elga Anita Torrezao Pereira	Director National of Mineral	
Badan Perminyakan Nasional/National Petroleum Authority (NPA)		
Emanuel Angelo Lay	Commercial Director	
Oscar Sanches Faria	Senior Officer – Finance & Fiscal Assurance	
Honesia Araujo	Marketing and Revenue Management Officer	
Nuno V. F. Alves	Finance & Fiscal Assurance Officer	
Isabel Joanila da Silva	Oil Marketing and Revenue Management Assistant	
Direktorat Nasional Pendapatan Minyak dan Mineral/National Directorate Petroleum and Minerals Revenue (NDPMR)		
Agustinho Ramos	Senior staff and Head of Compliance Department	
Kementerian Keuangan/Ministry of Finance (MoF)		
Filipe Nery Bernardo	Petroleum Fund Analyst	
Bank sentral Timor-Leste/Central Bank of Timor-Leste (CBTL)		
Fernando da Silva Carvalho	Chief Accountant	
Direktorat Jendral Statistik/General Directorate of Statistics (GDS)		
Paulina Rita Cruz Viegas	National Director of Economic and Social Statistics	
Perusahaan Minyak	Penanggung Jawab	Jabatan
Woodside Petroleum	Antonio Campos dos Santos	Country Representative and Community Relations Advisor
Woodside Petroleum	Susana Jardim	Management Accountant
Eni	Angelina Baptista Branco	Country Representative
Eni	Mark Sewell	Joint Venture Accounting Coordinator
Eni	Andrew Tay	Joint Venture Accountant
Eni	Kelvin Aw-Yang	Joint Venture Financial Auditor
Inpex	Kenji Kawano	Managing Executive Officer & Senior Vice President
Inpex	Yae Miyamoto	Planning Coordination Unit
Talisman	Read Keith	Director
Talisman	Millar Colleen	Senior Accountant Finance and Planning
Minza Oil and Gas Ltd	Dino Gandara	Former Vice President
Minza Oil and Gas Ltd	Martin Wollaston	Director
Timor Gap	Luis Martins	Director of Business & Development

Perusahaan Minyak	Penanggung Jawab	Jabatan
Timor Gap	Jacinta Paula Bernardo	Director of Corporate Service
Timor Gap	Francisco Alegria	Public Relation Advisor to the President & CEO
Timor Gap	Amandio Ribeiro	Finance Manager
Timor Gap	Henrique D.C Monteiro	Manager - Project Economics and Finance
Timor Gap	Francisco da Costa Monteiro	President & CEO
Tokyo Timor Sea ReSumbers	Shinsuke Tsujita	Public Relations
Tokyo Timor Sea ReSumbers	Yuhi Harada	Manager. Planning & Commercial
Australian Embassy. Dili	Peter M. Macfarlane	First Secretary
Santos	David Di Blasio	Finance Manager
Santos	Joe Ariyaratnam	Manager – Browse Timor Bonaparte and Technical Services